

4.3. KINERJA MAKRO SOSIAL.

4.3.1. ANGKA USIA HARAPAN HIDUP (E_0) JAWA TIMUR TAHUN 2006-2011

Pembangunan di segala bidang telah dilaksanakan oleh pemerintah secara terus menerus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pelaksanaan program-program pembangunan tersebut disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tersebut adalah indikator kesehatan.

Kesehatan adalah hak dasar manusia dan merupakan salah satu aspek kualitas sumber daya manusia yang penting. Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat secara fisik diharapkan menjadi manusia berkualitas sehingga dapat ikut berperan aktif (subyek) dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Indikator status kesehatan dapat dilihat dari usia harapan hidupnya, mengingat tingkat kesehatan dapat mempengaruhi usia harapan hidup. Sedangkan angka harapan hidup pada suatu usia tertentu adalah rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh seseorang yang telah mencapai usia tersebut, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu wilayah. Sehingga dapat dikatakan bahwa angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Secara umum Angka Harapan Hidup di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan Jawa Timur, hingga tahun 2011 diperkirakan angka harapan hidup akan mendekati angka 70. Namun demikian, Angka Harapan Hidup tersebut masih mengalami ketimpangan

terutama untuk wilayah dengan penduduk berstrata ekonomi dan pendidikan rendah. Sehingga diperlukan langkah antisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi angka harapan hidup adalah rata-rata usia kawin pertama, rata-rata lama sekolah wanita berstatus kawin, rata-rata jumlah pengeluaran rumahtangga, Rata-rata lama pemberian ASI eksklusif, Persentase rumah tangga yang memiliki air bersih, Persentase penduduk miskin persentase penolong persalinan dengan tenaga non medis, ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Lusi Firdial dalam "Pemodelan Angka Harapan Hidup Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah Dengan Metode Geographically Weighted Regression (GWR)" diperoleh hasil bahwa Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap AHH di Jawa Timur berdasarkan model GWR adalah Persentase persalinan yang dilakukan dengan tenaga non medis dan jumlah tenaga medis.

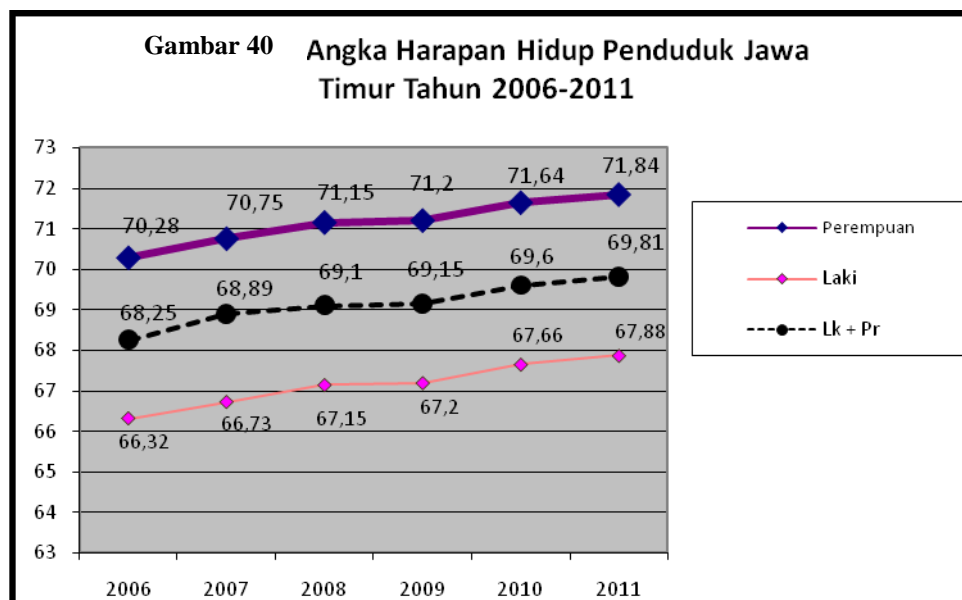
Jika diperhatikan AHH menurut sebaran wilayah yang dikelompokkan berdasarkan besaran angka harapan hidup dan persentase penolong persalinan dengan tenaga non medis, nampak ada kecenderunagn pengelompokkan yang homogen untuk sebagian daerah-daerah yang berdekatan secara geografis, kultur maupun kondisi social ekonomi, sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1. berikut :

Tabel 4.192
Pengelompokan Kab/Kota Berdasarkan Angka Harapan Hidup (E0) dan Persentase Penolong Persalinan Menggunakan Tenaga Non Medis (TNM) Di Jawa Timur Tahun 2011

E0 < E0 Jatim (69,81); TNM<TNM Jatim (9,16 %)	E0 > E0 Jatim (69,81); TNM<TNM Jatim (9,16 %)	E0 > E0 Jatim (69,81); TNM>TNM Jatim (9,16 %)	E0 < E0 Jatim (69,81); TNM>TNM Jatim (9,16 %)
Kab. Malang	Kab. Ponorogo	Kab. Pacitan	Kab. Jember
Kab. Lumajang	Kab. Trenggalek		Kab. Bondowoso
Kab. Banyuwangi	Kab. Tulungagung		Kab. Situbondo
Kab. Pasuruan	Kab. Blitar		Kab. Probolinggo
Kab. Nganjuk	Kab. Kediri		Kab. Bangkalan

Kab. Madiun	Kab. Sidoarjo		Kab. Sampang
Kab. Bojonegoro	Kab. Mojokerto		Kab. Pamekasan
Kab. Tuban	Kab. Jombang		Kab. Sumenep
Kab. Lamongan	Kab. Magetan		
Kota Pasuruan	Kab. Ngawi		
Kota Batu	Kab. Gresik		
	Kota Kediri		
	Kota Blitar		
	Kota Malang		
	Kota Probolinggo		
	Kota Mojokerto		
	Kota Madiun		
	Kota Surabaya		

Secara teori angka harapan hidup yang dibedakan menurut jenis kelamin tidak mengalami perubahan antar periode. Dari hasil estimasi yang diperkirakan pada tahun 2011, AHH di Jawa Timur selisih 2 point dibandingkan AHH perempuan. Namun demikian kenaikannya antar periode sedikit lebih cepat dibandingkan AHH perempuan.



4.3.2. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER 1000 KELAHIRAN HIDUP JAWA TIMUR TAHUN 2006-2011

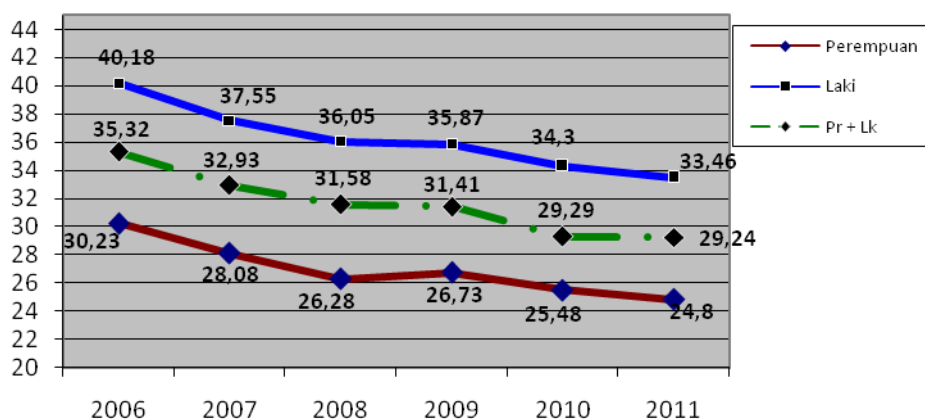
Pada dasarnya evaluasi maupun perencanaan terhadap program kesehatan di suatu wilayah dapat pula dilihat dari tinggi rendahnya besaran angka kematian bayi pada periode tertentu. Seperti halnya perubahan angka harapan hidup, maka perubahan angka kematian bayi umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu yang relative pendek. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam mencermati perubahan AHH ataupun AKB yang merupakan angka estimasi per tahun.

AKB didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB kurang dari 40 sangat sulit diupayakan penurunannya (*hard rock*), antara 40-70 tergolong sedang namun sulit untuk diturunkan (*medium rock*), dan lebih besar dari 70 tergolong mudah untuk diturunkan (*soft rock*).

Menurut Utomo (1984), tinggi rendahnya tingkat pendidikan ibu erat kaitannya dengan tingkat pengertian terhadap perawatan kesehatan, higiene, perlunya pemeriksaan kehamilan dan lain-lain. Sehingga kematian balita yang rendah dijumpai pada golongan wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi angka kematian bayi adalah jumlah sarana kesehatan, persentase persalinan yang dilakukan dengan bantuan medis, rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga, persentase daerah berstatus desa, persentase rumah tangga yang memiliki air bersih, dan persentase penduduk miskin.

Dari hasil estimasi yang dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung, diperkirakan angka kematian bayi (AKB) di Jawa Timur tahun 2011 masih berada pada kisaran angka 29. AKB untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan AKB perempuan dengan perbedaan angka lebih dari 8 point. Berikut series estimasi AKB menurut jenis kelamin periode 2006 – 2011.

Gambar 41 Estimasi Perkembangan AKB
Tahun 2006 - 2011 di Jatim



Sebaran AKB antar kab/kota masih menunjukkan variasi yang heterogen. Kelompok AKB tertinggi berada pada kisaran 48,47 – 56,45, sedangkan yang terendah mencapai angka 20,02 - 29,07.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009–2014, beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi Jawa Timur terkait dengan angka kematian bayi adalah 1) Masih memburuknya kualitas air permukaan dan air tanah akibat pencemaran, pemanasan global, rusaknya lingkungan dan tidak tertatanya sistem pembuangan limbah rumah tangga, menyebabkan menurunnya akses air bersih pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, 2) Distribusi tenaga kesehatan belum merata, lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. 3). Masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.

4.3.3. RASIO POSYANDU PER SATUAN BALITA JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh

kader posyandu. Terdapat lima program prioritas dalam Posyandu, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare.

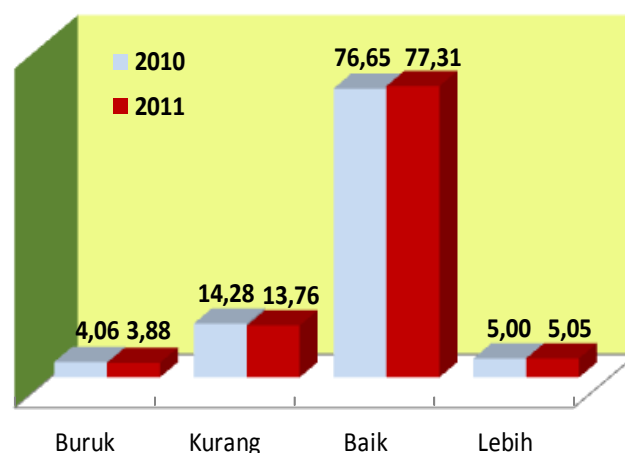
Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu 2010-2011, jumlah Posyandu aktif di Jawa Timur mengalami penurunan yaitu dari 45.603 menjadi 45.637, atau berdasarkan rasio posyandu per satuan balita mengalami penurunan sebesar 0,94 poin dari 21,87 menjadi 20,93. Atau dapat dikatakan bahwa hanya tersedia sekitar 20 posyandu bagi setiap 1.000 balita di Jawa Timur. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan posyandu yaitu dengan meningkatkan kualitas posyandu dan kualitas kader atau kinerja kader posyandu.

4.3.4. PERSENTASE BALITA BERGIZI BURUK JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011.

Persentase balita gizi buruk di Jawa Timur terus mengalami penurunan, dari 4,80 persen tahun 2007 (Riskesdas, 2007) kemudian berdasarkan hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2008-2009, persentasenya menjadi 4,47 persen di tahun 2008 dan 4,33 persen di tahun 2009. Kemudian

dari hasil survei gizi balita di Jawa Timur tahun 2010, persentase balita bergizi buruk sebesar 4,06, sedangkan di tahun 2011 menurun sebesar 0,18 poin persen menjadi 3,88 persen. Hal ini dimungkinkan karena adanya pencanangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) tahun 2011-2015 oleh Pemprov Jawa Timur yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor

Gambar 42
Persentase Balita Bergizi Buruk
Jawa Timur 2010-2011



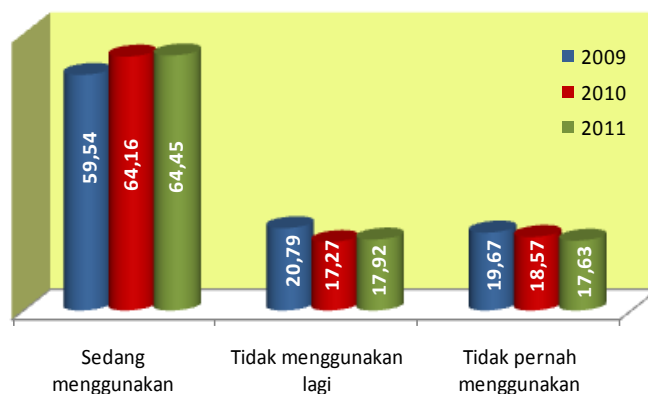
Sumber : Survei Prevalensi Gizi 2010-2011

3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan yang terfokus pada penurunan kemiskinan dan kelaparan. Salah satu tujuan dari RAD-PG Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah meningkatkan status gizi masyarakat dengan target penurunan prevalensi gizi balita buruk dan kurang menjadi 10 persen. Walaupun persentase balita gizi buruk dan kurang sudah mengalami penurunan di tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih belum mencapai target RAD-PG.

4.3.5. PERKEMBANGAN RASIO AKSEPTOR KB JAWA TIMUR TAHUN 2009-2011.

Selama tiga tahun terakhir, jumlah pasangan usia subur (pasangan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin) di Jawa Timur mengalami peningkatan, yaitu dari 7.536.308 pasangan pada tahun 2009, menjadi 7.686.730 pasangan

Gambar 43
Persentase Pasangan Usia Subur menurut Partisipasi dalam ber-KB
Jawa Timur, 2009-2011



Sumber : Hasil Susenas 2009 – 2011 (revisi)
BPS Provinsi Jawa Timur

dibanding tahun 2010 (64,16 persen) dan tahun 2009 (59,54 persen). Rasio akseptor KB pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 642 menjadi 641 akseptor KB (tahun 2010) dalam setiap 1000 pasangan usia subur.

Alat atau cara KB yang paling banyak digunakan adalah suntik sebesar 59,82 persen, kemudian pil (22,74 persen) dan IUD/spiral (7,21 persen). Sementara itu, sebesar 44,85 persen pasangan usia subur yang tidak/tidak

pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 menjadi 7.843.524 pasangan. Dilihat dari persentase pasangan usia subur yang sedang menggunakan alat/cara KB, terjadi peningkatan di tahun 2011 (64,45 persen)

pernah menggunakan alat KB disebabkan alasan fertilitas (mandul, menopause, puasa kumpul, tradisi, ingin punya anak) dan alasan fertilitas lainnya sebesar 29,42 persen. Sedangkan faktor pasangan usia subur tidak menggunakan lagi alat KB adalah karena ingin punya anak yaitu sebesar 46,29 persen, kemudian pasangan yang segera ingin punya anak (kurang dari 2 tahun) sebesar 34,31 persen.

4.3.6. RASIO BAYI BERAKTE KELAHIRAN JAWA TIMUR TAHUN 2011

Akte kelahiran merupakan produk catatan sipil yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Oleh karena itu kepemilikan produk catatan sipil ini sebagai langkah awal menuju tertib administrasi. Bersamaan itu pula kepemilikan akte kelahiran pada seorang anak akan memberikan kepastian akan hak dan jaminan hukum yang bersangkutan.

Pengajuan akte yang dilakukan pada saat bayi berumur 1 tahun atau lebih harus membutuhkan pengesahan dari pengadilan negeri. Berdasarkan catatan, rasio bayi yang berakte kelahiran telah mencakup 75 persen di tahun 2009. Kondisi ini lebih baik dari tahun sebelumnya karena beberapa hal yaitu pelayanan akte kelahiran gratis pada rumah tangga miskin, pelayanan satu atap dan kejelasan dari standar operasional pelayanan. Pada tahun 2010, jumlah bayi berjumlah 560.372 jiwa dan 87 persen diantaranya sudah berakte kelahiran. Penerbitan akte kelahiran pada tahun 2011 sebanyak 88,6 persen dari balita yang ada. Peningkatan ini dikarenakan kesadaran masyarakat semakin meningkat, sosialisasi yang semakin intens dan program pemutihan akte kelahiran yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.

4.3.6. RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011.

Besarnya rasio dokter per satuan penduduk di Jawa Timur pada tahun 2010 dan 2011 tidak mengalami perubahan yaitu 0,2 per seribu penduduk atau dapat diartikan bahwa hanya tersedia 2 dokter setiap 10.000 penduduk.

Rasio ini menunjukkan masih sangat rendahnya ketersediaan jumlah dokter jika dibandingkan dengan tingginya jumlah penduduk di Jawa Timur.

4.3.7. RASIO RUMAH SAKIT PER SATUAN PENDUDUK JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011.

Jumlah rumah sakit di Jawa Timur, mengalami penambahan dari tahun 2010 sejumlah 301 menjadi 324 rumah sakit di tahun 2011. Adanya penambahan jumlah rumah sakit baik swasta maupun pemerintah dari tahun sebelumnya, menunjukkan semakin meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan penduduk dalam hal pemenuhan fasilitas kesehatan.

Dilihat dari tahun 2010, jumlah rumah sakit pemerintah mengalami penambahan yaitu dari 51 menjadi 63 rumah sakit. Sedangkan rumah sakit swasta yang tersedia meningkat sebesar 11 rumah sakit, sehingga pada tahun 2011 jumlah rumah sakit swasta menjadi 261. Dari jumlah tersebut, maka rasio rumah sakit setiap 10.000 penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 0,07 (tahun 2010) menjadi 0,09 (tahun 2011).

4.3.8. RASIO TENAGA MEDIS PER SATUAN PENDUDUK JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011.

Tenaga medis merupakan tenaga ahli kedokteran yang memberikan pelayanan medis dengan menggunakan teknik kedokteran berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Selama tahun 2010-2011, rasio tenaga medis di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,02 poin, yaitu 0,17 menjadi 0,15 untuk setiap 1000 penduduk di tahun 2011. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk pada dua tahun terakhir yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah tenaga medis yang tersedia.

4.3.9. ANGKA MELEK HURUF UMUR 15 TAHUN KEATAS JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011

Dalam *Human Development Report* 1990 (UNDP, 1990), terdapat tiga elemen esensial dalam konteks pembangunan manusia, yaitu: *longevity* (umur panjang), *knowledge* (pengetahuan), dan *decent living* (hidup layak). *Longevity* diwakili oleh indikator angka harapan hidup, *knowledge* diwakili oleh tingkat melek huruf dan tingkat dari jenjang pendidikan tertinggi, serta *decent living* diwakili oleh indikator *GDP (Gross Domestic Product)* per kapita.

Spesifik pada elemen pengetahuan, melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, melek huruf juga menjadi dasar bagi setiap manusia, agar dapat mempelajari dan mengetahui bagaimana upaya dalam membangun. Ini yang menjadikan indikator melek huruf, sebagai indikator paling esensial di antara indikator pembangunan manusia yang lain. Demikian pentingnya indikator ini, maka dalam formulasi *Human Development Index (HDI)* untuk pengetahuan, tingkat melek huruf memiliki bobot yang lebih tinggi (2/3).

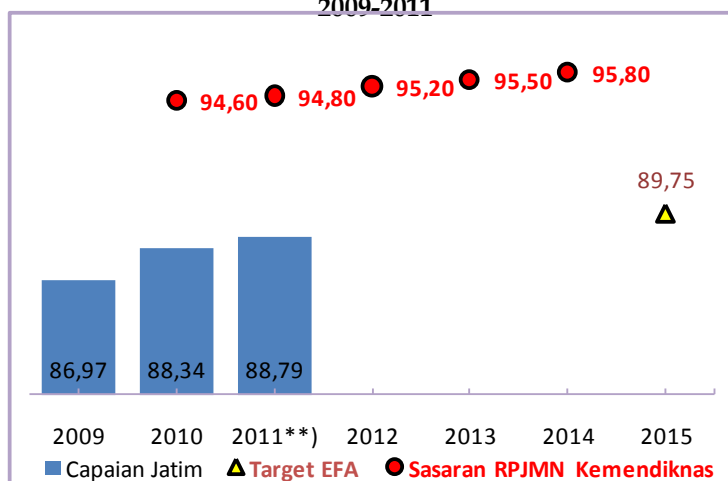
Sasaran pencapaian indikator melek huruf usia 15 tahun ke atas ini, menjadi sasaran global dan nasional. Adapun target global, tertuang dalam salah satu dari enam tujuan kerangka kerja Dakar (2000) dalam *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua), yaitu tercapainya 50 persen peningkatan melek huruf dewasa pada tahun 2015 dari situasi 1990, lebih khusus lagi untuk penduduk perempuan. Adapun situasi melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia pada tahun 1990, penduduk laki-laki 86,70 persen, perempuan 72,50 persen, dan total 79,50 persen (UNESCO, 2002; 208). Sementara target global Indonesia tahun 2015 untuk melek huruf usia 15 tahun ke atas, penduduk laki-laki 93,35 persen, perempuan 86,25 persen, dan total 89,75 persen. Target global untuk Indonesia ini lebih rendah dari sasaran nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemendiknas 2010-2014 (halaman 60), yaitu

pada tahun 2014 angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas tinggal 4,2 persen.

Situasi Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas

Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur 2009-2011, masih terpaut lebih lima persen dengan target sasaran dalam RPJMN Kemendiknas 2010-2014. Walaupun selama 2009-2011 mengalami peningkatan dari 86,97 persen tahun 2009 menjadi 88,34 persen di tahun 2010 dan 88,79 persen di tahun 2011. Walaupun terjadi peningkatan, namun capaian tahun 2011 masih di bawah target EFA Indonesia tahun 2015, yang terpaut sekitar 0,96 persen. Capaian di tahun 2011 juga masih di bawah target RPJMN 2010-2014 Kementerian Pendidikan Nasional 2010, yang terpaut sebesar 6,01 persen.

Gambar 44
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf
2009-2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur,

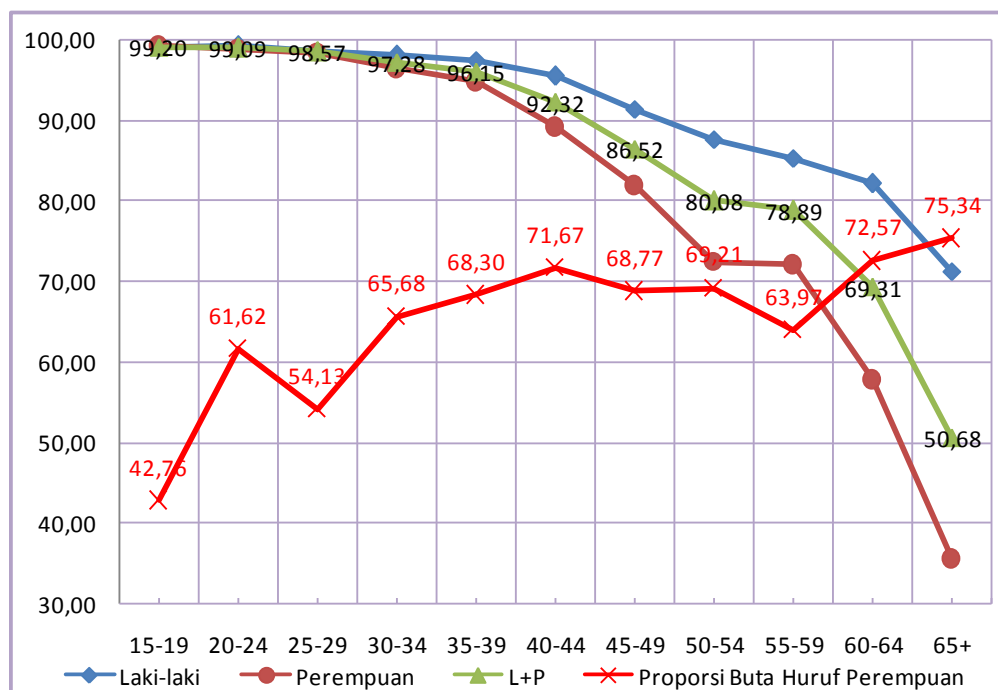
Keterangan : **) Angka Sementara Susenas 2011 Triwulan 1-3

Identifikasi Permasalahan

Permasalahan rendahnya capaian melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas ini, terutama terjadi pada penduduk perempuan yang tingkat melek hurufnya hanya sebesar 83,54 persen, terpaut lebih dari sembilan persen dengan penduduk laki-laki dengan persentase melek huruf sebesar 92,92 persen di tahun 2011. Untuk melek huruf laki-laki, sejak tahun 2009 sudah

berada di atas target EFA Indonesia tahun 2015, sedangkan untuk penduduk perempuan saat ini masih terpaut 6,21 persen. Sejalan dengan agenda global isu utama melek huruf ini lebih fokus pada penduduk perempuan, maka situasi Jawa Timur menguatkan kondisi ini karena 70.98 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf adalah perempuan, artinya lebih dari 2/3 kelompok sasaran buta huruf di Jawa Timur adalah perempuan.

Gambar 45
Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf dan Proporsi Penduduk Perempuan Buta Huruf menurut Kelompok Umur di Jawa Timur 2011) (Persen)**



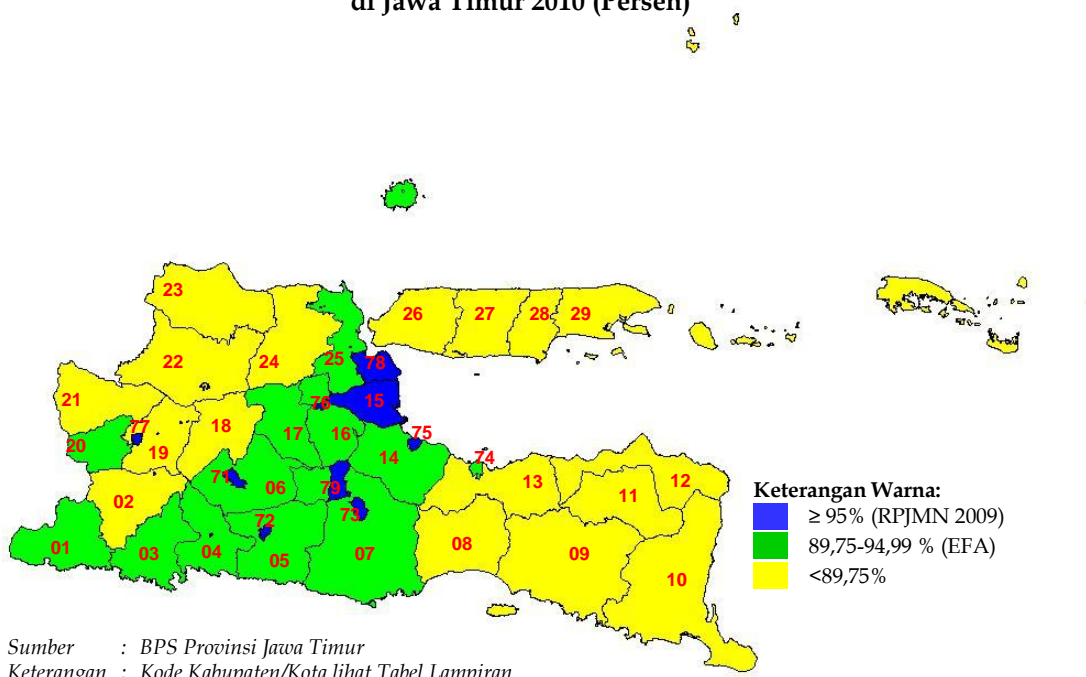
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur,
 Keterangan : **) Angka Sementara Susenas 2011 Triwulan 1-3

Jika target RPJMN 2011 menjadi acuan, maka kelompok sasaran utama pemberantasan buta aksara di Jawa Timur lebih difokuskan pada kelompok usia 40 tahun ke atas yang capaiannya di bawah 95 persen. Bila dibedakan menurut jenis kelamin, maka untuk penduduk perempuan dimulai pada kelompok usia 40 tahun ke atas, sedangkan untuk laki-laki dimulai pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Gambaran bahwa melek huruf dapat menjadi cerminan jangkauan akses pada pendidikan terlihat dari Gambar 5.5, yaitu terjadinya penurunan proporsi melek huruf penduduk perempuan

dalam kelompok 15-39 tahun. Ini menjadi indikasi bahwa dampak pembangunan bidang pendidikan dalam empat dasawarsa terakhir, terutama untuk memudahkan akses pendidikan (utamanya melalui Program SD Inpres dan Wajib Belajar) yang secara nyata menurunkan hambatan bagi penduduk perempuan.

Sementara itu, sebaran permasalahan melek huruf usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, bila sasaran RPJMN 2010 dan target EFA Indonesia 2015 menjadi acuan, seperti terlihat dalam Gambar 5.6. Wilayah Kabupaten dengan warna kuning adalah prioritas pemberantasan buta huruf di Jawa Timur, karena di wilayah ini target EFA 2015 melek huruf belum tercapai. Sedangkan untuk wilayah hijau merupakan wilayah yang telah mencapai target melek huruf EFA 2015, namun tidak memenuhi sasaran RPJMN 2009. Hanya delapan wilayah di Jawa Timur yang telah mencapai sasaran melek huruf dalam RPJMN 2009, dengan capaian melek huruf 95 persen atau lebih, yaitu kabupaten/kota dengan warna biru.

Gambar 46
Sebaran Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Capaian terhadap Sasaran/Target RPJMN/EFA di Jawa Timur 2010 (Persen)

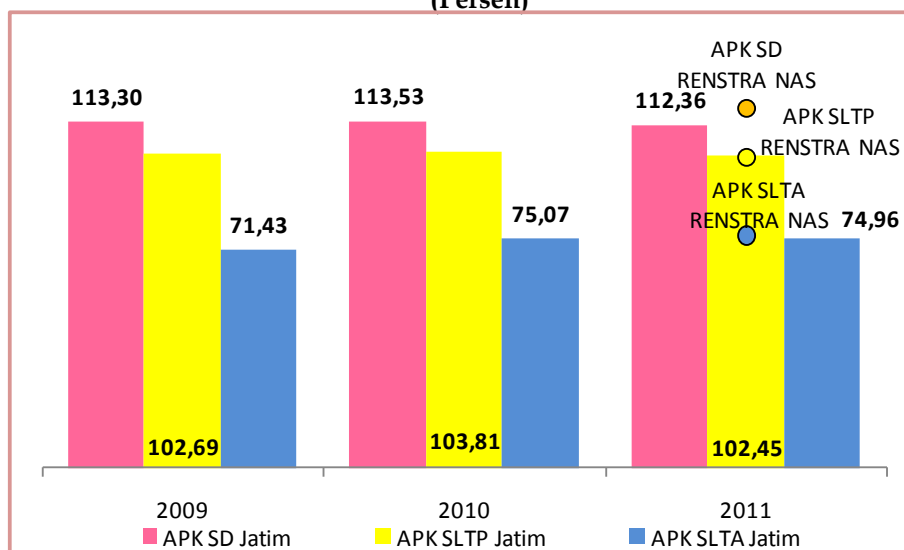


4.3.10. KASAR (APK) JAWA TIMUR MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2010-2011

APK merupakan salah satu indikator kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Depdiknas 2006-2010) yang berlangsung saat ini. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, serta tingkat kemampuan fisik dan intelektual. Cerminan dari kondisi ini terlihat dari APK untuk setiap jenjang pendidikan.

Sasaran Nasional APK Nasional 2011, yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Sasaran APK SD (termasuk SDLB, MI, dan Paket A) sebesar 117,6 persen, SLTP/MTs/Paket B sebesar 101,50 persen, dan SLTA/SMK/MA/Paket C sebesar 76,0 persen.

Gambar 47
APK SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2009-2011 dan Sasaran APK SD, SLTP, dan SLTA 2011 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 (Persen)



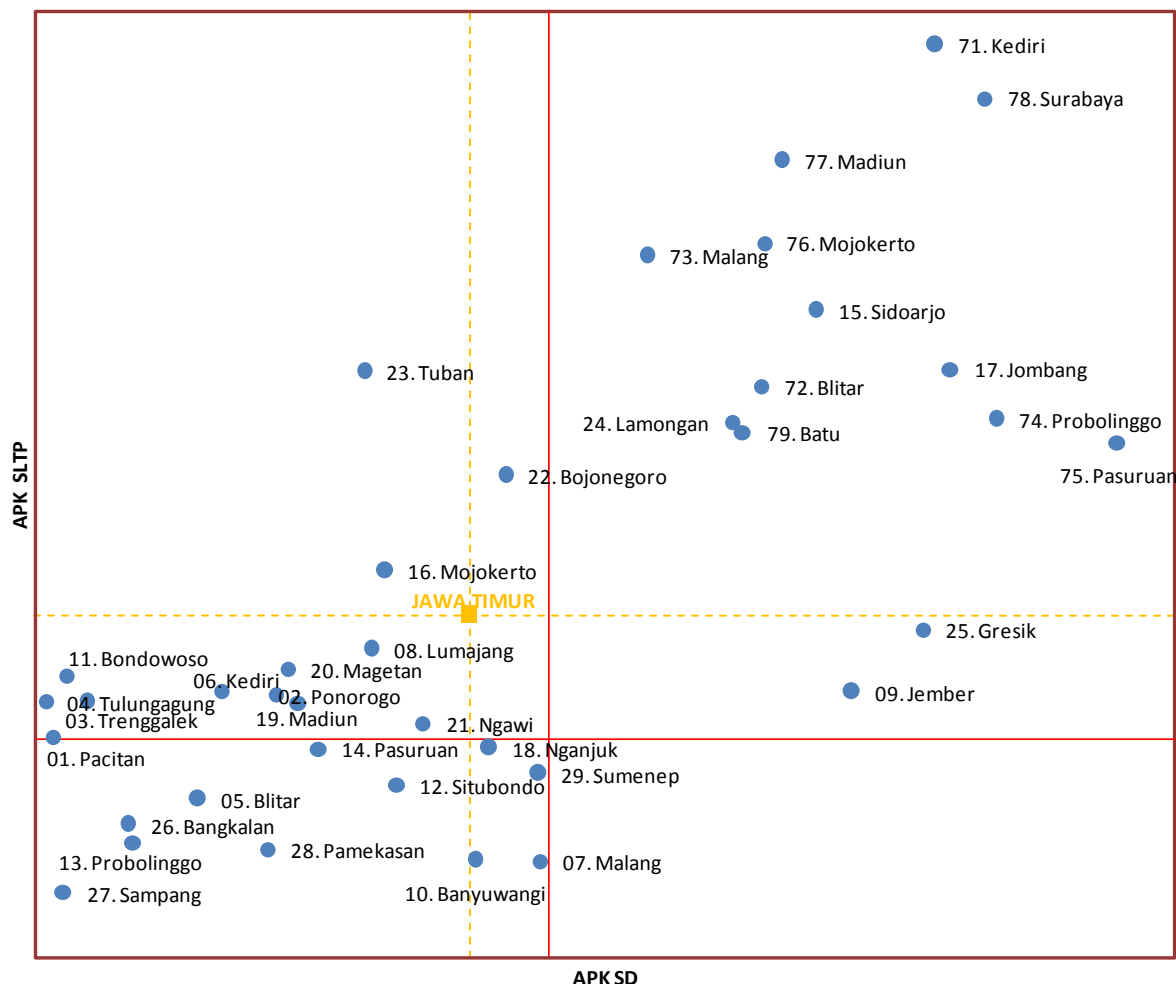
Sumber Diknas Provinsi Jawa Timur

APK SD di Jawa Timur tahun 2011 sebesar 112,36 persen, turun sebesar 1,17 persen poin dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 113,53 persen. Bila sasaran APK SD tahun 2011 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 digunakan sebagai dasar rujukan, maka capaian APK SD Jawa Timur tahun 2011 tersebut, belum mencapai sasaran dan terpaut sebesar 5,24 persen. Namun tidak demikian halnya untuk APK SLTP, karena capaian APK SLTP Jawa Timur tahun 2011 sudah mencapai 102,45 persen, di atas sasaran APK SLTP tahun 2011 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 (terlampai 0,95 persen). Sementara untuk APK SLTA di Jawa Timur tahun 2011 sebesar 74,96 persen, masih berada di bawah sasaran APK SLTP tahun 2011 dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 (terpaut 1,04 persen).

Data sebaran APK Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010, menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara capaian APK pendidikan pada jenjang tertentu dengan jenjang di atasnya¹. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan APK pada jenjang yang lebih tinggi, mesti dimulai dengan program lebih nyata untuk peningkatan APK pada jenjang di bawahnya terlebih dahulu. Salah satu agenda program Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 adalah Wajar Dikdas 12 tahun, maka diperlukan upaya peningkatan capaian APK SLTP, terutama untuk Kabupaten yang masih rendah capaiannya.

¹ Hasil analisis korelasi terhadap APK SD, SLTP, dan SLTA Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2009, diperoleh hasil korelasi APK SD-SLTP sebesar 0,709 korelasi APK SLTP-SLTA sebesar 0,853 dan korelasi APK SD-SLTA sebesar 0,694. Semua nilai korelasi adalah signifikan.

Gambar 48
Sebaran APK SD dan SLTP menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2010 (Persen)



Sumber : Data Diknas Provinsi Jawa Timur

Catatan : - Garis warna merah mewakili sasaran tahun 2010 untuk APK SD(115,76 persen) dan APK SLTP (98,09 persen) dalam RPJMN 2006-2010.

- Garis putus-putus warna kuning adalah capaian APK SD dan SLTP Jawa Timur 2010

Jika sasaran APK tahun 2010 dalam RPJMN 2004-2009, digunakan sebagai acuan capaian APK kabupaten/kota, maka lebih dari setengah kabupaten di Jawa Timur belum mencapai sasaran APK SD (terdapat 25 kabupaten). Jumlah kabupaten yang belum mencapai sasaran APK SLTP berjumlah 11 kabupaten dan 17 kabupaten yang memiliki APK SLTA di bawah sasaran. Fokus wilayah yang perlu mendapat perhatian dari capaian APK adalah Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten

Sumenep. Mengingat capaian APK untuk semua jenjang pendidikan di wilayah tersebut, di bawah sasaran APK 2010 dalam RPJMN 2010-2014.

Gambar 49
Sebaran APK SLTP dan SLTA menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010 (Persen)



Sumber : Data Diknas Provinsi Jawa Timur

Catatan : - Garis warna merah mewakili sasaran tahun 2009 untuk APK SLTP(98,09 persen) dan APK SLTA (69,34 persen) dalam RPJMN 2006-2010.

- Garis putus-putus warna kuning adalah capaian APK SLTP dan SLTA Jawa Timur 2010.

4.3.11. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) JAWA TIMUR MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2010-2011

Seperti halnya APK, APM juga merupakan salah satu indikator tonggak-tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Depdiknas 2010-2015) yang berlangsung saat ini. Dalam Renstra Depdiknas 2010-2015, APM merupakan tanggung jawab dari Ditjen Mandikdasmen. Sasaran APM di

setiap jenjang dalam Renstra tersebut memiliki periodisasi pembangunan yang berbeda. Untuk APM SD ditetapkan masuk dalam periode 2005-2009, yaitu 95,00 persen di tahun 2009. APM SLTP masuk dalam periode pembangunan 2010-2015, yaitu tercapai 92,00 persen pada tahun 2015. Sedangkan APM SLTA masuk dalam periode pembangunan 2015-2020, yang ditargetkan 90,00 pada akhir periode pembangunan (2020)².

Tabel 4.193
APM SD, SLTP, dan SLTA Jawa Timur 2009-2011 dan Sasaran APM dalam Renstra Depdiknas (Persen)

APM		SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jatim	2009	97,71	85.44	51.96
	2010	97,89	86,00	56,10
	2011	97,21	86,22	56,48
Sasaran Renstra Depdiknas	2009	95,00	-	-
	2015	-	92,00	-
	2020	-	-	90,00

Sumber : Diknas Provinsi Jawa Timur dan Depdiknas (2007)

Selama 2010-2011, terjadi peningkatan APM Jawa Timur pada jenjang pendidikan SLTP dan SLTA, tidak demikian halnya pada jenjang pendidikan SD. Pada jenjang pendidikan SD, terjadi penurunan APM sebesar 0,68 persen poin, dari 97,89 persen tahun 2010, menjadi 97,21 persen tahun 2011. Sementara APM SLTP Jawa Timur 2010-2011 naik sebesar 0,22 persen poin, dari 86,00 persen tahun 2010 menjadi 86,22 persen di tahun 2010. Seperti halnya jenjang pendidikan SLTP, untuk jenjang pendidikan SLTA, capaian APM Jawa Timur tahun 2011 sebesar 56,48 persen, lebih tinggi 0,38 persen bila dibandingkan besaran tahun 2010.

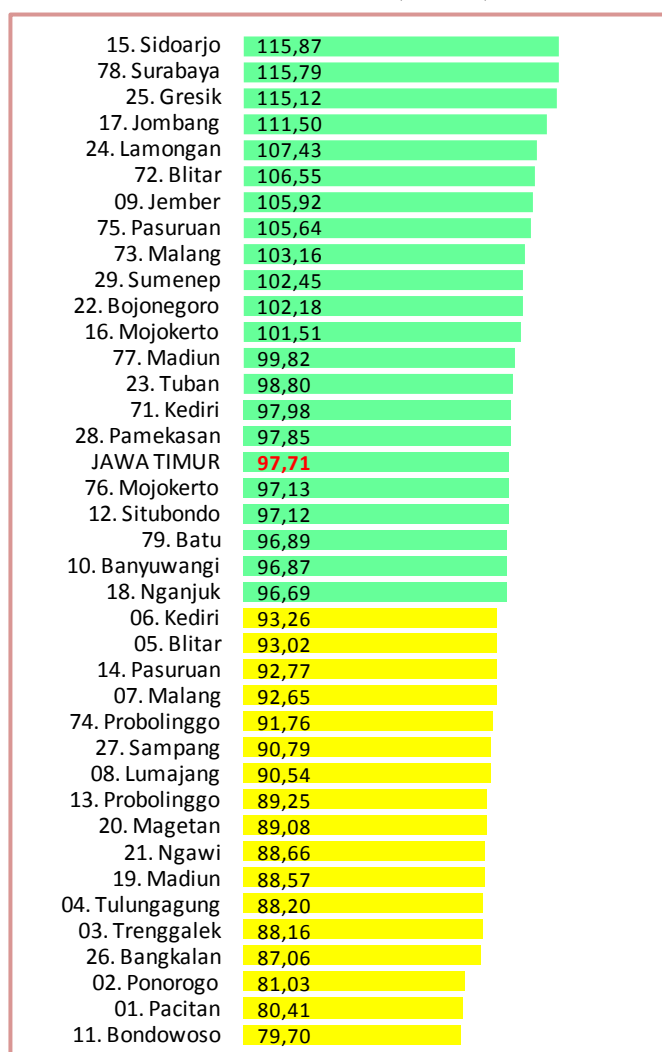
Karena APM SLTP dan SLTA belum menjadi agenda Nasional tahun 2010, maka perhatian lebih difokuskan pada APM SD. Capaian APM SD Jawa Timur telah mencapai target sejak tahun 2009. Tidak hanya pada level provinsi, juga pada sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur telah

² Lihat Depdiknas (2007; 101). Perlu ditambahkan bahwa dalam Renstra Depdiknas dilakukan periodisasi pembangunan, yaitu;

- Periode 2005-2010 diarahkan dalam rangka peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan.
- Periode 2010-2015 adalah peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional.
- Periode 2015-2020 adalah penguatan daya saing pada tingkat regional.
- Sedangkan periode 2020-2025 adalah penguatan daya saing pada tingkat internasional.

mencapai target ini. Data APM SD 2010 kabupaten/kota menunjukkan

Gambar 50
Sebaran APM SD menurut Kabupaten/Kota di
Jawa Timur 2010 (Persen)



Sumber : Data Diknas Provinsi Jawa Timur

Catatan : - Kabupaten/Kota dengan warna grafik hijau menunjukkan capaian di atas sasaran APM SD Nasional tahun 2010.

bahwa 17 kabupaten/kota belum mencapai target APM SD Nasional.

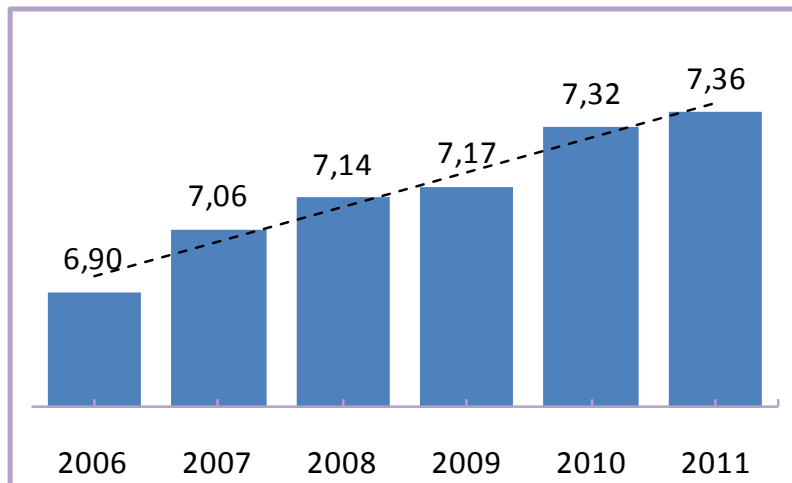
Bila diperhatikan, terdapat nilai APM yang janggal pada beberapa wilayah, karena idealnya nilai maksimum APM adalah 100 persen. Namun dalam data APM SD 2009 terlihat ada 12 kabupaten/kota dengan capaian APM SD di atas 100,00 persen. Ini dapat terjadi karena pada daerah yang relatif baik infrastruktur serta kualitas pendidikannya, menyebabkan banyak siswa dari kabupaten/kota lain bersekolah di kabupaten/kota tersebut (siswa komuter).

4.3.12. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH JAWA TIMUR TAHUN 2007-2011

Angka rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam indeks pendidikan, bersama dengan angka melek huruf, untuk menyusun komposit indeks pembangunan manusia dalam HDI/IPM. Rata-rata lama sekolah merupakan gambaran pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Dengan membandingkan besaran rata-rata lama sekolah antar

wilayah atau waktu, dapat di ketahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas penduduk.

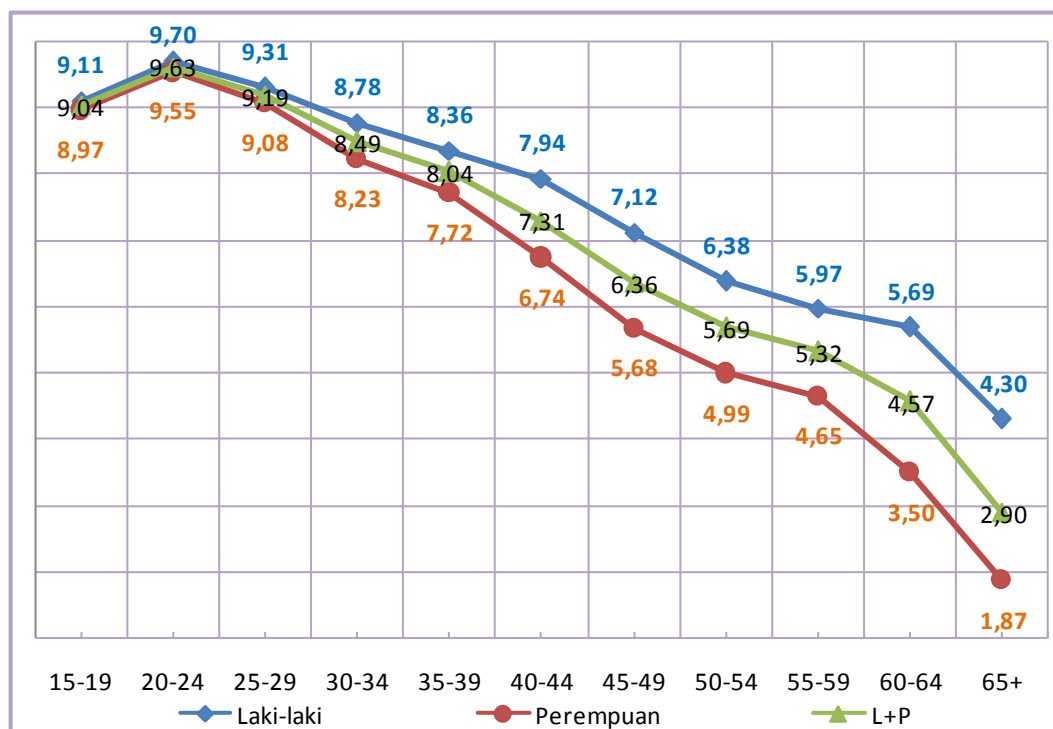
Gambar 51
Rata-rata Lama Sekolah Di Jawa Timur 2006-2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Keterangan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2006-2011 terjadi peningkatan kualitas penduduk dari setara lulus tingkat sekolah dasar (6 tahun), menjadi setara kelas satu pada jenjang pendidikan SLTP. Walaupun terjadi kenaikan, namun kenaikan tersebut relatif lambat, karena selama enam tahun hanya terjadi peningkatan sebesar 0,46 poin atau rata-rata hanya terjadi kenaikan 0,077 poin per tahunnya. Jika kondisi ini terus terjadi, maka secara linier diperkirakan tingkat pendidikan sebagian besar penduduk usia 15 tahun ke atas, baru setara lulusan tingkat SLTP (MYS 9 tahun) pada tahun 2029, setara lulusan tingkat SLTA (MYS 12 tahun) pada tahun 2063 mencapai nilai harapan (maksimal) rata-rata lama sekolah dalam IPM, yaitu 15 tahun.

Gambar 52
Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Jawa Timur 2010 (Tahun)

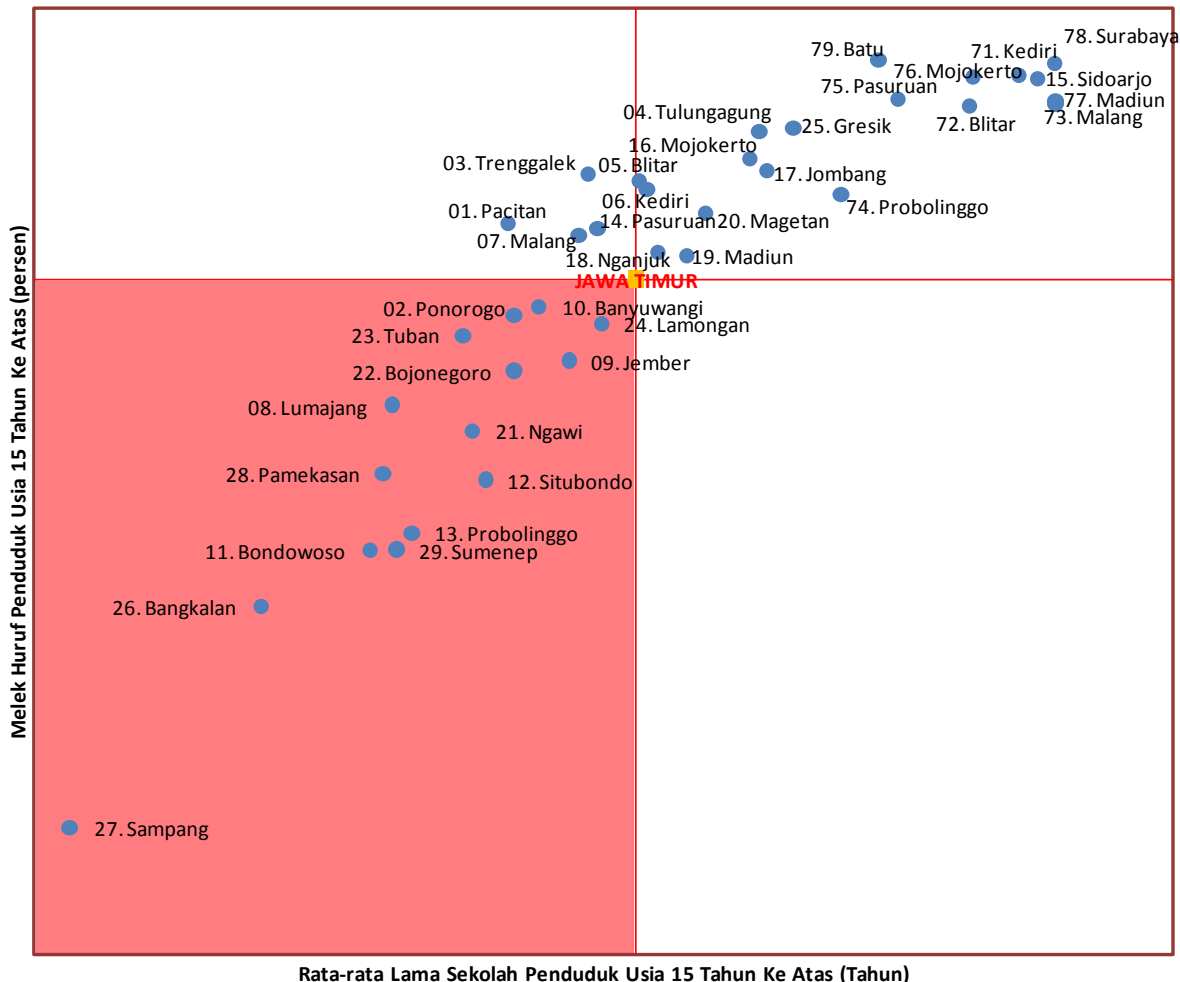


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Identifikasi Permasalahan

Masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas ini, terutama terjadi pada penduduk perempuan, dengan rata-rata lama sekolah sebesar 6,7 tahun atau setara lulusan SD, terpaut satu tahun lebih dengan penduduk laki-laki, yang memiliki rata-rata lama sekolah 7,8 tahun atau setara kelas satu SLTP di tahun 2009. Pembangunan pendidikan di Jawa Timur selama ini, baru membawa dampak peningkatan capaian pendidikan tertinggi penduduk di kelompok usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun setara lulusan SLTP. Sehingga tepat kiranya, salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD 2009-2014 untuk mengakselerasi situasi ini melalui program Wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA).

Gambar 53
Sebaran Capaian Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) dan Melek Huruf (Persen) Penduduk
15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2010



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Catatan : - Garis warna merah mewakili capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Melek Huruf Penduduk Jawa Timur.
 - Kabupaten dalam area merah merupakan wilayah dengan capaian rata-rata lama sekolah dan melek huruf di bawah Jawa Timur yang rendah.

Dimana Harus Memulai

Walaupun bobot dalam formulasi IPM rata-rata lama sekolah lebih rendah dibandingkan melek huruf, namun dengan melakukan intervensi pada peningkatan rata-rata lama sekolah, akan memberi pengaruh signifikan pada pencapaian melek huruf³. Maka bisa dipastikan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi, akan memiliki tingkat melek huruf yang tinggi pula. Namun jika sumber daya bagi terlaksananya

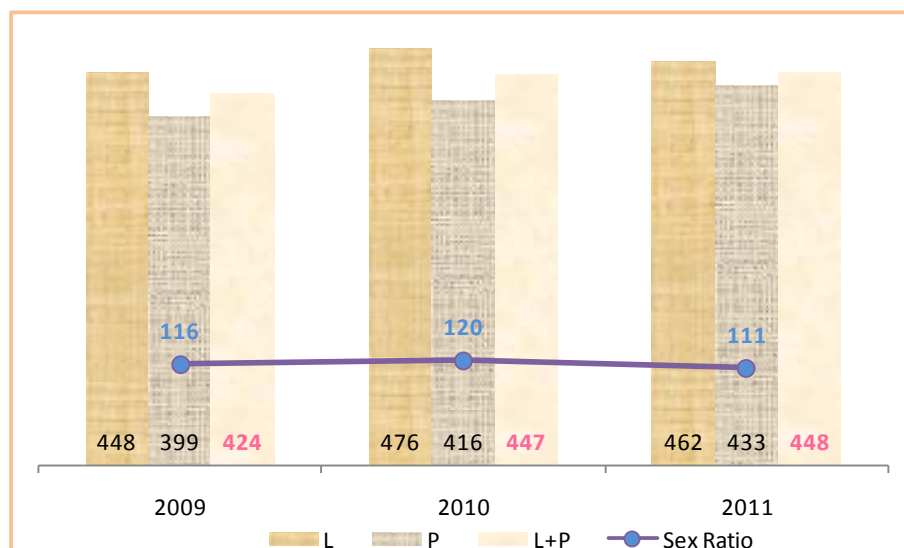
³ Hasil analisis korelasi antara rata-rata lama sekolah dan melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Jawa Timur tahun 2009, memberikan tingkat korelasi yang sangat kuat yaitu 0,911.

program peningkatan rata-rata lama sekolah adalah terbatas, maka terdapat lima belas kabupaten dengan prioritas utama (pada area merah), dimulai dari Kabupaten Sampang, Bangkalan, Bondowoso, Sumenep, Pamekasan, Lumajang, Probolinggo, Situbondo, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Ponorogo, Banyuwangi, Jember, dan Lamongan. Harapan yang ingin dicapai dengan intervensi pada wilayah ini adalah dampak ikutannya, yaitu terjadinya peningkatan melek huruf yang masih relatif rendah.

4.3.13. RASIO LULUSAN S1/S2/S3 JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011

Dalam lampiran PP No 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penduduk. Karena produktifitas penduduk di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin akan baik kualitas tenaga kerjanya.

Gambar 54
Rasio Lulusan S1/S2/S3 menurut Jenis Kelamin (per 10.000) dan Sex Ratio Lulusan S1/S2/S3 (Persen) di Jawa Timur 2009-2011



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2009-2011 di Jawa Timur terjadi peningkatan rasio lulusan S1/S2/S3, dari 424 orang di tahun 2009 menjadi 447 orang di tahun

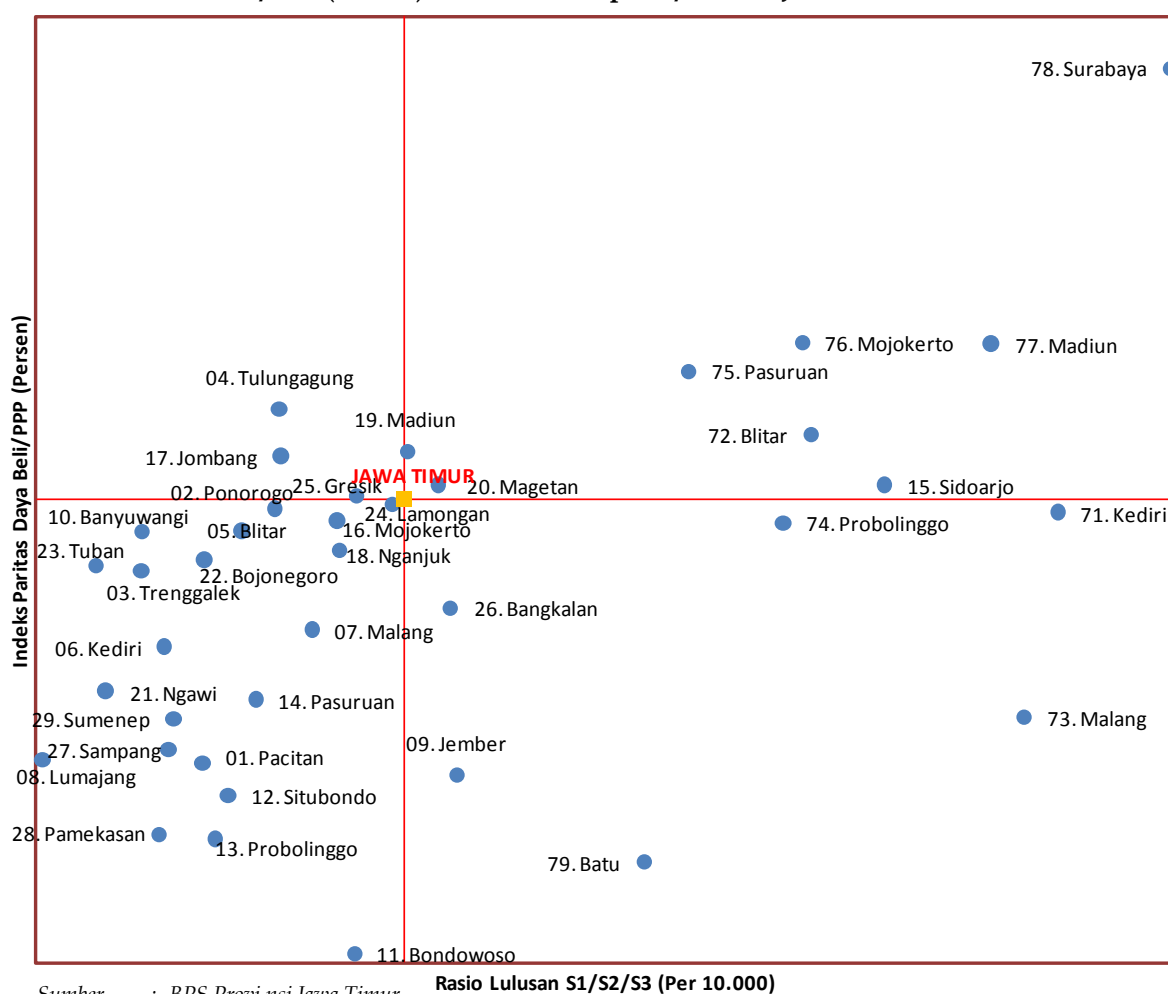
2010 dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 448 orang lulusan S1/S2/S3 per sepuluh ribu penduduk. Peningkatan rasio lulusan S1/S2/S3 ini terutama terjadi pada penduduk perempuan, dari 399 orang di tahun 2009 menjadi 416 orang lulusan S1/S2/S3 tiap sepuluh ribu penduduk di tahun 2011 atau rata-rata terjadi peningkatan sebanyak 11 orang lulusan S1/S2/S3 tiap sepuluh ribu penduduk perempuan per tahun selama 2009-2011 di Jawa Timur. Sementara pada penduduk laki-laki terjadi peningkatan dari 448 orang di tahun 2009 menjadi 462 lulusan S1/S2/S3 per sepuluh ribu penduduk pada tahun 2011 atau rata-rata terjadi peningkatan sebanyak 4 orang lulusan S1/S2/S3 tiap sepuluh ribu penduduk laki-laki per tahun selama 2009-2011 di Jawa Timur.

Peningkatan lulusan S1/S2/S3 penduduk perempuan, juga terlihat dari turunnya *sex ratio* lulusan S1/S2/S3 dari 116 persen pada tahun 2009, menjadi 111 persen di tahun 2011. Bila situasi ini terus terjadi, maka dalam beberapa tahun rasio lulusan S1/S2/S3 penduduk perempuan akan sama bahkan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Jika situasi ini terjadi, maka sangat mungkin dari sisi jumlah juga akan sebanding atau bahkan lebih tinggi, yang tercermin dari semakin turunnya *sex ratio* lulusan S1/S2/S3. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa akibat positif pembangunan gender di Jawa Timur adalah terbukanya peluang yang besar pada pendidikan tinggi bagi perempuan di Jawa Timur. Selain itu dapat juga menjadi indikasi bahwa penduduk perempuan di Jawa Timur, memiliki cara pandang tentang nilai positif dari pendidikan yang lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki.

Harapan bahwa semakin tinggi kualitas penduduk yang tercermin dari rasio lulusan S1/S2/S3, maka akan semakin baik kualitas tenaga kerja. Output dari kondisi ini akan menguatkan kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah, yang tercermin oleh tingginya indeks paritas daya beli (PPP) penduduknya.

Berdasarkan kondisi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2010 menunjukkan bahwa, tidak semua wilayah dengan rasio lulusan S1/S2/S3 yang relatif baik, penduduknya memiliki capaian indeks daya beli yang relatif baik juga. Situasi ini hanya terjadi di Kota Surabaya, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, dan Blitar serta Kabupaten Magetan dan Sidoarjo. Namun tidak demikian untuk Kota Kediri, Probolinggo, Malang, dan Batu, serta Kabupaten Bangkalan dan Jember, dengan rasio lulusan S1/S2/S3 yang tinggi namun memiliki indeks daya beli yang relatif rendah.

Gambar 55
Sebaran Capaian Rasio Lulusan S1/S2/S3 (per 10.000 penduduk) dan Indeks Paritas Daya Beli/PPP (Persen) menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2010



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Catatan : Garis warna merah mewakili capaian Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk dan Indeks Paritas Daya Beli/PPP (Persen) Jawa Timur 2009

4.3.14. PERSENTASE JUMLAH TENAGA KERJA DIBAWAH UMUR DI JAWA TIMUR TAHUN 2011

Organisasi buruh se-dunia (ILO) memandang UU No. 13 tahun 2003 dan aturan tentang ketenagakerjaan di Indonesia dipandang cukup lengkap mengatur tentang ketentuan pekerja anak. Oleh karena itu penanganan pekerja anak perlu mendapatkan apresiasi dari berbagai unsur baik masyarakat, pengusaha, maupun Pemerintah.

Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia kurang dari 18 tahun, sementara konvensi ILO menetapkan, batas minimal usia pekerja di bawah umur adalah 15 tahun.

Tahun 2011 ini Kemenakertrans menargetkan menarik 3.360 orang pekerja anak di 15 provinsi dan 56 kabupaten/kota melalui Program Pengurangan Pekerja Anak dalam mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Para pekerja anak itu akan dikembalikan ke dunia pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ke-15 provinsi yang terlibat dalam penanganan pekerja anak adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Pikiran Rakyat, Rabu, 16/03/2011).

Berdasarkan seris data yang diolah dari Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah pekerja di bawah umur menunjukkan penurunan sejak periode 2008-2011. Perlu dipahami bahwa definisi pekerja di bawah umur yang diolah dari hasil Sakernas merujuk pada umur pekerja 10-17 tahun. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data yang tersedia dalam survey tersebut. Meski informasi mengenai pekerja di bawah umur yang tercakup dalam Sakernas sangat terbatas, namun demikian data tersebut setidaknya dapat disajikan secara berkesinambungan.

Pada tahun 2011, jumlah pekerja di bawah umur sebesar 320.814 orang atau turun sekitar 150 ribu anak. Dari sejumlah pekerja di bawah umur, sebagian besar adalah anak laki-laki dengan sex ratio sebesar 183,65 yang berarti dari 100 pekerja perempuan terdapat 183 pekerja laki-laki. Penurunan jumlah pekerja anak di Jawa Timur nampaknya sejalan dengan prediksi ILO sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah pekerja anak diprediksi akan terus menurun. Diduga salah satu penyebabnya adalah kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak semakin meningkat. Selain kesadaran orang tua, program pemerintah seperti wajar dikdas 9 tahun juga berpengaruh terhadap menurunnya jumlah pekerja anak.

Tabel 4.194
Jumlah Pekerja Di bawah Umur (10-17 Tahun) Tahun 2008-2011 di Jawa Timur

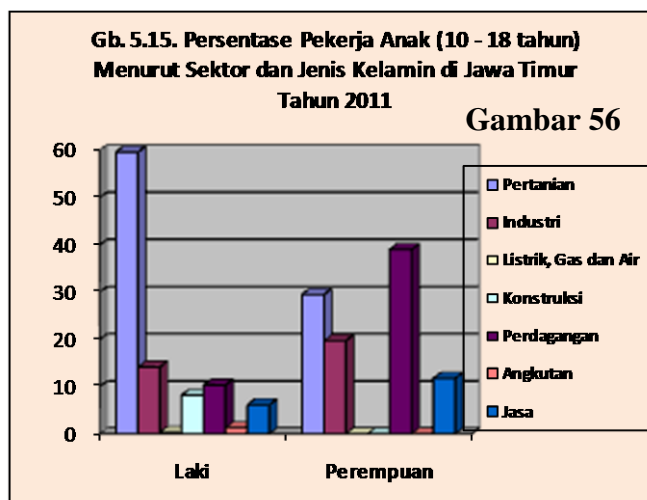
Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Pekerja di bawah umur
2008	363.922	167.868	531.790	2,80
2009	317.618	183.378	500.996	2,60
2010	276.990	194.406	471.396	2,39
2011	207.712	113.102	320.814	1,69

Sumber : Hasil Sakernas 2007 – 2011, BPS Jawa Timur

Salah satu indikator pekerja anak yang disajikan dalam bahasan ini adalah indikator rasio pekerja dibawah umur yang merupakan persentase penduduk berumur 10-17 tahun yang bekerja terhadap penduduk 10 tahun keatas yang bekerja. Dari Tabel 5.15 menunjukkan bahwa rasio pekerja anak di Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, rasio pekerja dibawah umur sebesar 1,69 yang berarti dari 100 penduduk 10 tahun keatas yang bekerja terdapat sekitar 1 - 2 orang penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja.

Secara garis besar faktor penyebab munculnya tenaga kerja di bawah umur dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari

dalam diri si anak, yang mendorong anak untuk melakukan aktifitas tertentu yang menghasilkan uang. Dengan hasil yang diperoleh anak akan menjadi senang dan dorongan tersebut akan terpuaskan. Faktor pendorong yang menyebabkan anak memilih menjadi pekerja anak antara lain: kemiskinan yang dialami orangtua, adanya budaya dan tradisi yang memandang anak wajib melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada orangtua, relatif sulitnya akses ke pendidikan, tersedianya pekerjaan yang mudah diakses tanpa membutuhkan persyaratan tertentu, dan tidak tersedianya fasilitas penitipan anak pada saat orangtua bekerja. Faktor penarik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak seringkali dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut.



Jika dilihat berdasarkan sebaran sektor yang mempekerjakan anak-anak (penduduk usia 10 – 17 tahun), hampir pada setiap sektor kegiatan ekonomi mempekerjakan pekerja di bawah umur. Namun

demikian keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi lebih bersifat sebagai pelengkap. Hal ini semakin kentara jika diamati dari status pekerjaan yang disandangnya. Dari enam kategori status pekerjaan, sebagian besar mereka bekerja sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yaitu sebesar 52,62 persen. Posisi kedua teratas setelah pekerja keluarga adalah berstatus sebagai buruh yaitu sebesar 24,48 persen. Tenaga kerja di bawah umur dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Dengan demikian para pengusaha

akan cenderung memilih anak karena upah yang diberikan akan cenderung lebih murah dari pada orang dewasa. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.

Meski persentasenya tidak terlalu besar namun yang menarik dari data yang ada menunjukkan bahwa terdapat sebesar 8,34 persen dari pekerja di bawah umur berstatus sebagai pengusaha (berusaha sendiri dan berusaha dibantu pekerja tidak dibayar).

Dengan mengacu standar jumlah jam kerja normal adalah 35 jam lebih dalam seminggu, dari hasil olah sakernas 2011 diketahui bahwa terdapat sekitar 45,67 persen pekerja dibawah umur yang bekerja diatas jam kerja normal.

Disadari bahwa data mengenai pekerja dibawah umur merupakan data yang relatif langka. Oleh karena itu analisis mengenai pekerja di bawah umur hanya dapat disajikan secara global.

4.3.15. RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011

Dalam rangka pelaksanaan program aksi menghadapi dampak ekonomi global dan angkatan kerja baru, Pemerintah Jawa Timur melalui program GKN tahun 2011 melakukan upaya penyelamatan terhadap masyarakat miskin dan penganggur yang diimplemantasikan secara nyata dalam setiap proses pembuatan keputusan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan saat ini adalah berupaya secara menyeluruh dari segala sektor yang bertujuan agar terciptanya perluasan kesempatan kerja. Salah satu upayanya adalah melalui pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pembentukan tenaga kerja mandiri dengan kegiatan penciptaan lapangan kerja bagi wirausaha kecil maupun wirausaha pemula.

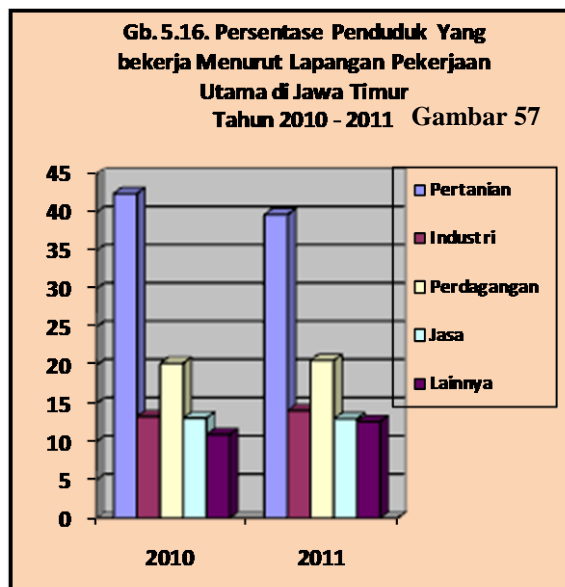
Kegiatan pembinaan wirausaha kecil maupun wirausaha pemula, diharapkan tidak hanya sekedar menciptakan kesempatan kerja akan tetapi lebih dari itu, antara lain mengupayakan bagaimana setiap daerah dapat menghasilkan produk-produk unggulan agar dapat berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas yang pada akhirnya dengan dukungan potensi daerah dapat mendorong terciptanya desa produktif.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Jawa Timur nampaknya dapat memberikan perubahan terhadap kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur, meskipun belum sepenuhnya menghasilkan dampak yang signifikan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat upaya-upaya perluasan kesempatan tenaga kerja memerlukan proses dan kerjasama yang baik antara pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS hingga triwulan III tahun 2011, potret ketenagakerjaan di Jawa Timur menunjukkan adanya perubahan struktur ketenagakerjaan di Jawa Timur. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2011 mencapai 19,76 juta orang, atau lebih tinggi 0,23 juta orang dibanding Agustus 2010.

Hal ini menunjukkan terjadinya mobilitas ketenagakerjaan selama kurun waktu 2010 – 2011, baik masuknya angkatan kerja baru yang berasal dari para lulusan pendidikan maupun pergeseran kegiatan penduduk usia kerja dari kelompok bukan angkatan kerja lainnya menjadi kelompok angkatan kerja. Secara umum terjadinya mobilitas tenaga kerja disebabkan karena perubahan kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Oleh karena penanganan ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan hanya sesaat, tetapi harus berkesinambungan dan secara terus menerus mendapatkan pengawasan. Dengan demikian perkembangan jumlah angkatan kerja tidak bersifat fluktuatif.

Dari sejumlah angkatan kerja yang ada di Jawa Timur hingga triwulan ketiga tahun 2011, terdapat 18,94 juta orang yang terserap dalam kegiatan

ekonomi atau yang bekerja. Dengan demikian angka ratio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan antara penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Jawa Timur menjadi 95,84 persen. Angka rasio penduduk yang bekerja dalam konsep ketenagakerjaan International Labor Organization (ILO), dikenal dengan istilah tingkat kesempatan kerja (TKK). Dibandingkan dengan tahun 2010, Angka rasio penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sekitar 0,75 persen point.



Karakteristik penduduk yang bekerja pada dasarnya bersifat dinamis, sehingga mudah terjadi perubahan antar waktu sesuai dengan iklim perekonomian maupun aspek lain. Berdasarkan distribusi sektoral, jumlah tenaga kerja yang terserap pada Agustus 2011 masih didominasi oleh

Sektor Pertanian (39,70 persen). Hal ini merupakan ciri dari daerah pedesaan yang masih menjadi wilayah terluas di Jawa Timur. Bahkan pada daerah pedesaan, Sektor Pertanian mampu menyerap hingga 59,0 persen pekerja. Sementara di daerah perkotaan Sektor Pertanian (17,39 persen) masih lebih rendah dibandingkan Sektor Industri (18,59 persen), Sektor Perdagangan (28,69 persen) dan Sektor Jasa (19,05 persen). Dari sisi lain, pekerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan hampir pada semua sektor kecuali Sektor Perdagangan. Pekerja perempuan pada Sektor Perdagangan mencapai 55,29 persen terhadap pekerja laki-laki.

Tabel 4.195
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama, 2010 – 2011
(ribu orang)

Status Pekerjaan Utama	2010	2011
(1)	(4)	(3)
<u>Kegiatan Formal</u>		
- Berusaha dibantu buruh tetap	555,88	618,44
- Buruh / Karyawan	4.879,82	5.486,71
<u>Kegiatan Informal</u>		
- Berusaha Sendiri	3.019,91	2.885,29
- Berush dibantu buruh tidak tetap	4.098,25	3.849,41
- Pekerja Bebas di Pertanian	1.470,16	1.431,75
- Pekerja Bebas di Non Pertanian	905,98	1.052,73
- Pekerja Tak Dibayar	3.768,09	3.616,02
TOTAL	18.698,10	18.940,34

Sumber : BPS Jatim, Sakernas 2010 - 2011

Selanjutnya dari tujuh kategori status pekerjaan utama dapat diidentifikasi dua kelompok utama terkait kegiatan ekonomi yaitu kegiatan formal dan kegiatan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap. Sementara kelompok kegiatan informal umumnya adalah mereka yang berstatus di luar itu. Berdasarkan identifikasi ini, jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, maka pada

Agustus 2011 terdapat sekitar 67,77 persen tenaga kerja bekerja pada kegiatan informal.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pekerja di sektor informal mengalami penurunan dan bergeser pada sektor formal. Sebenarnya sektor informal menawarkan peluang kerja yang lebih fleksibel dalam hal persyaratan namun lemah dalam hal jaminan keberlangsungan pekerjaan tersebut (job security). Pekerja pada kegiatan informal rentan terhadap gejolak ekonomi dan cenderung tidak menentu penghasilannya khususnya para pekerja bebas (pekerja tidak tetap) yang hanya bekerja sesekali saja dan berpindah-pindah majikan maupun jenis pekerjaannya. Pekerja pada kegiatan informal juga umumnya tidak dilindungi oleh jaminan sosial seperti fasilitas kesehatan, perlindungan kecelakaan, maupun jaminan pensiun.

Untuk sektor formal, pada Agustus 2011 jumlah buruh/karyawan dan pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap, naik dibandingkan tahun 2010.

Sementara itu, hampir seluruh tenaga kerja yang berada pada sektor informal mengalami penurunan kecuali pekerja bebas pada sektor pertanian.

4.3.16. RASIO TINGKAT KETERGANTUNGAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011

Berdasarkan struktur umur yang dihasilkan dari SP2010, penduduk Jawa Timur berada pada tahap transisi yaitu dari penduduk muda mengarah

Tabel 4.196
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
di Jawa Timur, Tahun 2010 - 2011

Tahun	0 – 14	15 – 64	65 +	Angka Ketergantungan
2010*)	24,59	68,34	7,07	46,32
2011**)	22,07	70,18	7,76	42,50

Keterangan : *) Hasil SP2010 (Angka diperbaiki).
**) Angka Sementara

ke struktur penduduk tua. Hal tercermin dari angka proporsi penduduk muda (di bawah 15 tahun) yang kurang dari 40 persen, dan proporsi penduduk tuanya (usia 65+) juga masih kurang dari 10 persen.

Indikator penduduk yang dihasilkan dari struktur penduduk menurut kelompok umur adalah ratio tingkat ketergantungan atau *dependency ratio (DR)*.

Indikator DR memberikan gambaran mengenai beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) terhadap penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas). Selama dua periode 2010 – 2011, diperkirakan angka DR mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan penduduk usia produktif semakin menurun. Penurunan ini merupakan dampak tidak langsung dari penurunan angka kelahiran dan membaiknya tingkat kesehatan masyarakat khususnya pada kelompok usia lanjut usia.

Dalam hal kebijakan, perubahan angka DR tentunya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan kebutuhan

penduduk menurut kelompoknya. Mengingat kebutuhan untuk masing-masing kelompok penduduk khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana tidak sama, misalnya : penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

4.3.17. PERSENTASE PARTISIPASI PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2009-2011

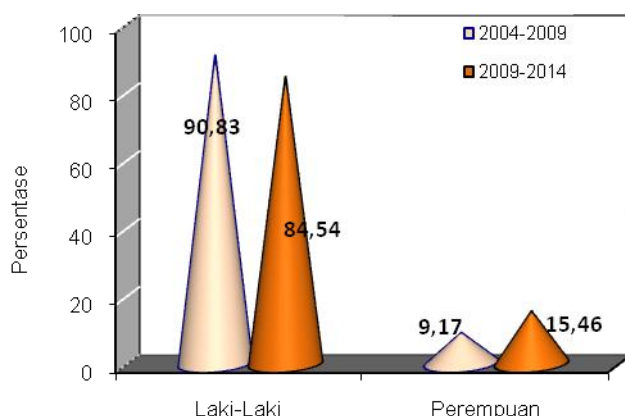
Peran perempuan Indonesia saat ini sudah semakin publik; perempuan dapat menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki serta dapat menjadi bagian yang signifikan dari tenaga kerja. Tidak ada hambatan secara hukum bagi keterlibatan perempuan di bidang politik dan pemerintahan. Akan tetapi kesenjangan gender di kehidupan politik dan pemerintahan masih merupakan tantangan global yang dihadapi oleh kaum perempuan.

Untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di lembaga legislatif, sebuah kuota diperkenalkan melalui UU No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum. Pasal 65 dari UU tersebut mengatur bahwa setiap partai politik setidaknya harus memiliki 30 persen calon anggota perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Selanjutnya UU Pemilu No. 10 Tahun

2008 Pasal 53 mensyaratkan partai politik menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislative terbuka di Pemilu 2009.

Meskipun partai-partai politik sudah berusaha untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, dominasi laki-laki

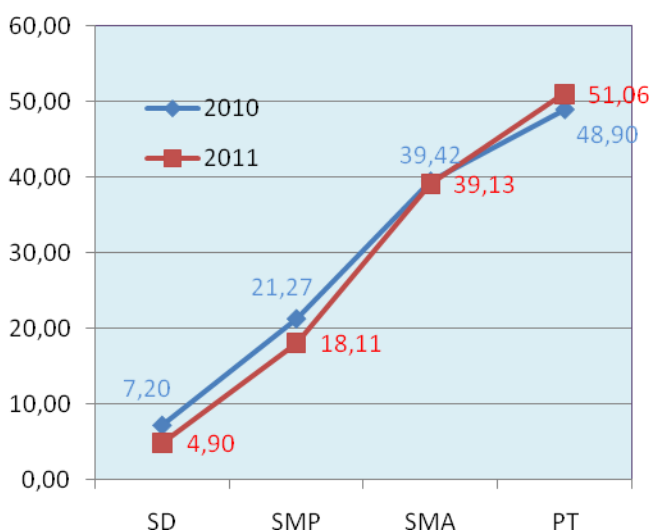
Gambar 58
Persentase Jumlah Anggota DPRD Jawa Timur
Menurut Jenis Kelamin
Periode 2004-2009 dan 2009-2014



dan pola pikir patriarkis yang sudah menancap dalam pikiran para pemimpin di partai politik merupakan salah satu faktor utama penentu bagi perempuan untuk masuk ke bidang politik. Selama 2 periode terakhir, keterwakilan perempuan dalam parlemen di Jawa Timur masih kurang dari 30 persen. Akan tetapi, sudah terlihat adanya peningkatan wakil perempuan sebagai anggota DPRD di Jawa Timur dalam periode 2009-2014.

Jumlah anggota DPRD perempuan pada periode 2004-2009 hanya sekitar 9,17 persen dan angka ini mengalami peningkatan menjadi sekitar 15,46 persen pada periode 2009-2014. Peningkatan ini antara lain diduga sebagai akibat makin banyaknya organisasi-organisasi perempuan, baik di dalam maupun di luar partai-partai politik. Mereka bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik untuk mempermudah pemilihan dan nominasi perempuan. Selain itu adanya kewajiban memenuhi kuota 30 persen perempuan di Pemilu 2009 yang ditetapkan dalam UU Pemilu No. 10/2008, meskipun tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi.

Gambar 59
Persentase PNS Perempuan
Menurut Tingkat Pendidikan
di Jawa Timur Tahun 2010-2011



Pada bidang pemerintahan, peranan perempuan tercermin dari keterlibatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini makin banyak perempuan Indonesia yang masuk ke sektor pemerintahan, meskipun demikian masih sedikit perempuan yang menempati posisi-posisi tertinggi.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Jawa Timur selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2011, jumlah PNS perempuan di Jawa Timur meningkat sebesar 3,28 persen dibandingkan tahun 2010. Proporsi PNS perempuan pada tahun 2010 adalah sekitar 43,90 persen, dan sedikit meningkat menjadi sekitar 45,45 persen pada tahun 2011. Apabila diperhatikan menurut tingkat pendidikan, peningkatan terbesar terjadi pada PNS perempuan pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu sekitar 2,16 persen. Dengan demikian diharapkan keterlibatan perempuan sebagai PNS tidak hanya meningkat dari sisi jumlahnya saja tapi juga dalam kualitasnya

4.3.18. INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (*POVERTY SEVERITY INDEX*) JAWA TIMUR TAHUN 2008-2011

Pengukuran kemajuan pembangunan suatu daerah diantaranya dapat dilihat dari perkembangan kemiskinan agregatnya. Kemiskinan agregat merupakan angka atau proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pada saat bersamaan angka tersebut dipandang belum cukup memberikan gambaran kemiskinan secara utuh karena hal ini tidak lepas dari multidimensinya kemiskinan. Informasi lain yang mendukung gambaran perkembangan kemiskinan yaitu indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan.

Dalam kurun waktu setahun (Maret 2010-Maret 2011), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,38 pada bulan Maret 2010 menjadi 2,27 pada bulan Maret 2011. Pola ini diikuti pula angka Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,59 menjadi 0,54 pada periode yang sama (Tabel 5.5). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung

mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Tabel 4.197. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Jawa Timur Menurut Daerah, Maret 2008- Maret 2011

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
<u>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)</u>			
Maret 2008	2,34	4,38	3,38
Maret 2009	2,18	3,54	2,88
Maret 2010	1,53	3,18	2,38
Maret 2011	1,51	2,96	2,27
<u>Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)</u>			
Maret 2008	0,61	1,23	0,93
Maret 2009	0,60	0,91	0,76
Maret 2010	0,37	0,79	0,59
Maret 2011	0,35	0,72	0,54

Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Maret 2008 s/d Maret 2011

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan lebih tinggi 2 kali dari pada perkotaan. Pada bulan Maret 2011, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan hanya 1,51 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,96. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) untuk perkotaan sebesar 0,35 sementara di daerah perdesaan sebesar 0,72 atau 2 kali lipat daripada perkotaan. Kedua angka tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah dari pada daerah perkotaan. Akan tetapi pada saat yang bersamaan percepatan upaya perbaikan tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih cepat dari daerah perkotaan. Hal ini ditunjukkan dari besaran penurunan kedua angka tersebut pada masing-masing daerah yaitu 0,02 poin baik P_1 maupun P_2 untuk daerah perkotaan dan untuk perdesaan sebesar 0,22 poin untuk P_1 dan 0,05 poin untuk P_2 .

4.3.19. PERSENTASE PENDUDUK DI ATAS GARIS KEMISKINAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2006-2011

Perkembangan perekonomian Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang diindikasikan dengan variabel makro ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan perekonomian Jawa Timur secara langsung dapat dirasakan oleh penduduk. Indikasi kasar ini dapat dilihat dari persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

Gambar 60
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan
Di Jawa Timur Tahun 2005-2011



Sumber : BPS, Hasil Pengolahan Susenas

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir , persentase penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan peningkatan diatas kisaran 1 persen pertahunnya. Pada waktu yang sama terlihat peningkatan tersebut mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,83 persen pada tahun 2009, 1,42 persen pada tahun 2010 dan 1,03 persen pada tahun 2011.

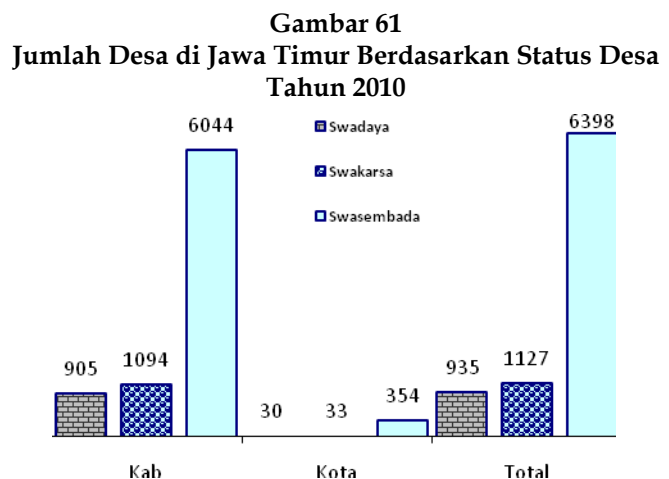
4.3.20. PERSENTASE DESA BERSTATUS SWASEMBADA TERHADAP TOTAL DESA JAWA TIMUR TAHUN 2010

Berdasarkan data hasil Potensi Desa (Podes) tahun 2003, jumlah desa/kelurahan berstatus swasembada di Jawa Timur adalah 6.398 dari total 8.460 desa/kelurahan atau 75,63 persen. Dengan demikian terdapat

24,37 persen desa/kelurahan yang tidak berstatus swasembada, yang terdiri atas 11,05 persen desa/kelurahan swadaya dan 13,32 persen desa/kelurahan swakarsa.

Bila dibedakan menurut kabupaten dan kota, maka lebih banyak desa/kelurahan di wilayah kota yang sudah berstatus swasembada, yaitu 84,89 persen. Di wilayah kabupaten, desa/kelurahan berstatus swasembada sebesar 75,15 persen. Apabila dicermati menurut kabupaten/kota, terdapat 13 kabupaten/kota yang memiliki desa swasembada di atas 90 persen, bahkan beberapa di antaranya sudah 100 persen swasembada.

Data klasifikasi desa dan kelurahan yang diperoleh berdasarkan aturan dalam Permendagri no 12 tahun 2007 masih belum tersedia, maka klasifikasi desa tersebut masih menggunakan data tahun 2003. Pengklasifikasi desa sampai dengan tahun 2011 masih belum dilakukan oleh pemerintah daerah (kab/kota).



Sumber : Podes 2003, BPS Jawa Timur

4.3.21. RASIO PERMUKIMAN LAYAK HUNI JAWA TIMUR TAHUN 2006-2011

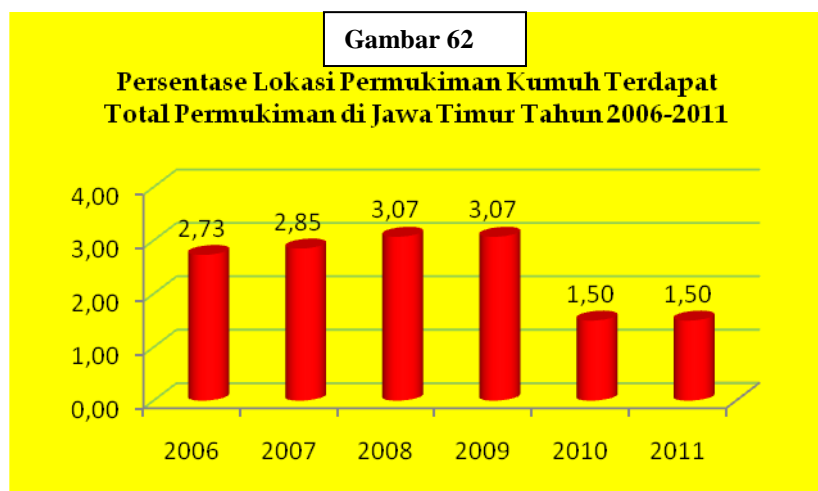
Permukiman (Human Settlement) adalah tempat (ruang) untuk hidup dan berkehidupan bagi kelompok manusia (Doxiadis,1971). Sementara itu menurut UU No2 Tahun 1992 pengertian permukiman adalah suatu perumahan atau kelompok perumahan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Permukiman akan selalu berkaitan erat dengan perumahan (Housing).

Informasi pemukiman layak huni maupun kumuh berdasarkan catatan yang dihimpun dari Pemerintah Kab/Kota. Jumlah pemukiman kumuh sebanyak 4 pemukiman di tahun 2005. Sementara itu pada tahun 2010, pemukiman kumuh sebanyak 1,5 persen dari jumlah pemukiman yang ada atau mencapai 15.964 lokasi yang tersebar di Provinsi Jawa Timur.

Selama 5 tahun terakhir permukiman kumuh menunjukkan peningkatan kecuali tahun 2010. Penurunan dalam 1 tahun terakhir diduga permukiman kumuh yang terletak pada lokasi illegal telah mengalami penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penurunan persentase pemukiman kumuh akan diiringi dengan peningkatan persentase permukiman layak huni. Permukiman layak huni mencapai 98,50 persen pada tahun 2010 dan 96,93 persen pada tahun 2009.

Pada tahun 2011 permukiman layak huni masih pada kisaran angka 98,50 persen dari

permukiman huni yang ada.



4.3.22. PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM JAWA TIMUR TAHUN 2009-2010

Air minum merupakan unsur kehidupan yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Oleh karena itu air minum seharusnya adalah air yang sehat dan aman dikonsumsi oleh tubuh manusia. Air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, penyediaannya ada yang melalui proses pengolahan maupun tanpa proses pengolahan (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002).

Tabel 4.198
Persentase Penduduk Jawa Timur yang Berakses
Air Minum Tahun 2009-2011

Sumber air minum	2009	2010	2011
Air kemasan	11,99	15,56	17,00
Leding	15,10	12,98	11,00
Sumur bor/pompa	24,25	24,46	22,63
Sumur terlindung	30,83	29,72	30,87
Sumur tak terlindung	3,39	2,79	3,56
Mata air terlindung	11,10	11,33	11,25
Mata air tak terlindung	1,99	2,23	2,46
Lainnya	1,33	0,92	1,23

Sumber : Susenas 2009-2010, BPS Jawa Timur

Air yang langsung bersumber dari alam dapat beresiko tercemar bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya lainnya. Terlebih lagi di Jawa Timur pada tahun 2011 sekitar 49,37 persen penduduknya masih menggunakan air minum yang bersumber langsung dari alam (sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, dan lainnya). Bila dibandingkan dengan tahun 2010 (46,99 persen), berarti mengalami kenaikan sebesar 2,38 persen.

Pada tahun 2011, kabupaten/kota yang lebih dari 80 persen penduduknya masih menggunakan air minum yang bersumber langsung dari alam adalah Kabupaten Blitar (88,81 persen), Kabupaten Trenggalek (87,20 persen), Kabupaten Lumajang (85,13 persen), Kabupaten Pacitan (81,81 persen), Kabupaten Pamekasan (81,65 persen), dan Kabupaten Bondowoso (80,69 persen). Sedikitnya masih ada sekitar 1,23 persen

penduduk Jawa Timur pada tahun 2011 yang memanfaatkan air sungai atau danau untuk sumber air minumnya. Lambat laun penduduk juga mulai beralih ke air kemasan (bermerek atau isi ulang) karena dirasa air tersebut lebih higienis dan praktis. Jika terjadi polusi air atau polusi lainnya yang menyebabkan tidak sehatnya sumber air minum maka bisa dibayangkan kondisi kesehatan masyarakat nantinya.

Dengan demikian pengelolaan sumber air minum merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai sumber modal harus membuat kebijakan yang lebih bersifat massal, sedangkan masyarakat harus menjaga lingkungannya, minimal di sekitar rumah untuk menyelamatkan sumber air yang aman.

4.3.24. PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH JAWA TIMUR

Pertambahan penduduk dan perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Hal ini akan terasa bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Namun demikian pembenahan masalah sampah, bukan hanya menjadi tugas pemerintah, kesadaran masyarakat pun sangat diperlukan.

Peningkatan

kesadaran

masyarakat dalam

pengelolaan

lingkungan akan

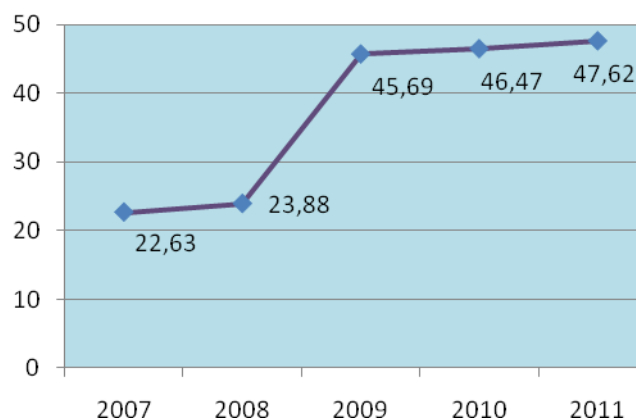
mendorong

terciptanya wilayah

yang sehat dan

nyaman.

Gambar 63
Persentase Pengelolaan Sampah di Jawa Timur
Tahun 2007-2011



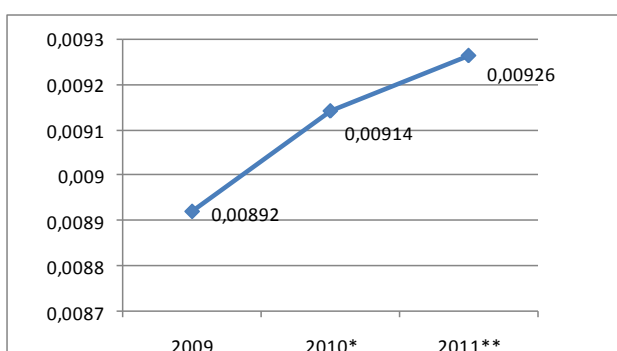
Sumber: Dinas Kebersihan/BLH/PU Kab/Kota Se Jawa Timur

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memilah dan mengolah limbah menjadi barang yang bermanfaat. Dengan strategi tersebut, limbah rumah tangga dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan dan juga dapat menyelamatkan kelestarian bumi di masa yang akan datang. Sementara itu, pemerintah pusat dan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai tujuan yang dimaksud dalam UU No.18 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah.

Pada tahun 2011, pengelolaan sampah di Jawa Timur mencapai 47,62 persen dari jumlah sampah yang dihasilkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,15 persen. Sementara itu, apabila diperhatikan selama 5 tahun terakhir tampak persentase penanganan sampah sebelum tahun 2009 masih sekitar 20 persen. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2009, sejak diterbitkannya UU No.18 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, sehingga penanganan dan pengelolaan sampah yang menjadi lebih baik dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan.

4.3.25. RASIO KEKERASAN DALAM RUMAHTANGGA (KDRT) JAWA TIMUR TAHUN 2009-2011

Gambar 64 Rasio KDRT Jawa Timur 2009-2011



Sumber : Polres Kab/Kota Se Jatim, Susenas 2009-2011,
Catatan : *) Angka Diperbaiki
**) Angka Sementara

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-undang ini disusun sebagai usaha penghapusan KDRT. Dengan adanya Undang-undang ini, negara bisa melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku dan melindungi korban akibat KDRT. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana.

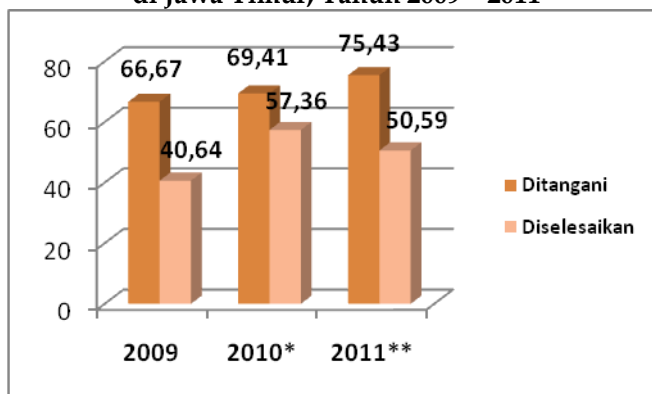
Pada tahun 2009 rasio KDRT terhadap jumlah rumahtangga di Jawa Timur sebesar 0,00892 persen. Angka rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap 10.000 rumahtangga terdapat sekitar 9 kejadian KDRT di tahun 2009. Angka rasio KDRT ini cenderung meningkat hingga tahun 2011 dimana rasionya mencapai 0,00926 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa keberanian korban KDRT untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya semakin meningkat karena hal ini dijamin oleh undang-undang.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, atau masalah sosial lainnya. Faktor-faktor ini perlu ditelaah lebih lanjut agar usaha untuk mengurangi kejadian KDRT bisa tepat sasaran.

4.3.26. PENANGANAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT JAWA TIMUR (%).

Meskipun Pemerintah terus menerus berusaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, namun tidak bisa dipungkiri masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pelayanan. Partisipasi

Gambar 65
Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
di Jawa Timur, Tahun 2009 – 2011



Sumber: DPRD Kab/Kota Se Jawa Timur

Catatan : * = Angka Diperbaiki

** = Angka Sementara

masyarakat dalam mengoreksi pemerintah diperlukan agar kinerja pemerintah menjadi semakin baik. Layanan Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menjembatani setiap aspirasi masyarakat dalam

menanggapi setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Setiap pengaduan yang masuk harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga dapat diproses sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Kab/Kota tahun 2009 tercatat sebanyak 1.095 pengaduan, sekitar 66,67 persen diantaranya dapat diproses, dan sekitar 40,64 persen sudah dapat diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2010 pengaduan yang masuk sebanyak 1.046 pengaduan dengan rincian 69,41 persen dapat ditangani, serta 57,36 persen dapat terselesaikan. Semen-tara itu pada tahun 2011 tercatat 757 pengaduan dimana 75,43 persen di antaranya ditangani dan 50,59 persen bisa diselesaikan (beberapa kab/kota pelaporan baru sampai dengan bulan September 2011).

4.3.27. RASIO PUSKESMAS, POLIKLINIK, PUSKESMAS PEMBANTU PER SATUAN PENDUDUK JAWA TIMUR TAHUN 2010-2011

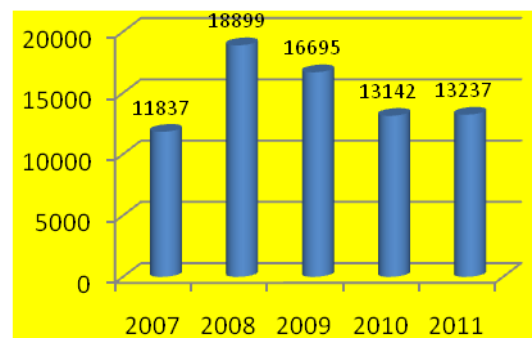
Dalam kurun waktu 2010-2011, jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu mengalami pertambahan yang tidak terlalu besar. Namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jawa Timur, maka

pertambahan jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu belum dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Karena kecilnya kenaikan jumlah tersebut, maka rasio puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,11 unit untuk setiap 1.000 penduduk. Atau terdapat 11 unit (puskesmas, poliklinik, atau puskesmas pembantu) dalam setiap 100.000 penduduk.

4.3.28. RASIO JUMLAH PENDUDUK TERKENA DAMPAK LAPINDO DIBANDING PENERIMA GANTI RUGI TAHUN 2011

PT Lapindo Brantas yang disekarang diambil alih oleh PT Minarak dalam melakukan pembayaran ganti rugi berpedoman pada peraturan pemerintah. Pembayaran dilakukan dengan 2 teknik yaitu 20 persen dan 80 persen. Data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang datanya bersumber dari PT Minarak, proses

Gambar 66
Jumlah Realisasi Pembayaran Berkas Jual Beli Tanah dan Bangunan Tahun 2007-2011



Sumber: BPLS, Perpres NO. 14 Th 2007

ganti rugi mulai dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 yang masing-masing mencakup 11.837 berkas, 18.899 berkas dan 16.695 berkas. Rasio perbandingan antara penduduk terkena dampak lapindo dengan penerima ganti rugi dapat didekati dengan penyelesaian berkas dengan jumlah keluarga yang terdampak lumpur Sidoarjo. Pada tahun 2007, rasio tersebut sebesar 53,40 persen yang berarti dari 100 keluarga yang terdampak lumpur Sidoarjo yang telah menerima ganti rugi sebesar 53 keluarga. Pada tahun 2008, rasio tersebut mengalami peningkatan

46,55 persen dari tahun sebelumnya atau menjadi 99,95 persen. Sementara itu rasio ditahun 2009 telah mencapai 84,99 persen.

Pada tahun 2010 berdasarkan realisasi pembayaran berkas yang sudah terverifikasi sebanyak 13.142 berkas dengan uang muka 20 persen dan 12.951 berkas dengan jenis pembayaran pelunasan 80 persen. Sementara itu berkas yang sudah lunas 100 persen mencapai 8.422 berkas.

Sementara itu pada tahun 2011, PT Minarak melakukan kelanjutan pembayaran dengan obyek yang sama yaitu 13.237 berkas yang terdiri dari 13.164 berkas lolos verifikasi dan 73 berkas belum lolos verifikasi. Pembayaran PT Minarak mengacu pada Perpres 14 Tahun 2007.

Penyelesaian dan pembayaran berkas juga dilakukan oleh BPLS berdasarkan Perpres No 48 Tahun 2008 sebanyak 1.790 berkas di tahun 2011. Berkas yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebanyak 1.746 berkas dan sudah dilakukan pembayaran dengan skema 70 persen sebanyak 1.725 berkas, pembayaran 50 persen sebanyak 15 berkas dan pembayaran 20 persen sebanyak 6 berkas.

4.3.29. RASIO JUMLAH DAN BESAR KERUGIAN NEGARA TERHADAP APBD (%) TAHUN 2010-2011

Penyelewengan penggunaan APBN atau APBD merupakan hal yang sangat merugikan negara. Secara kuantitatif, penyelewengan itu dilihat dari jumlah dan besar anggaran yang telah diselewengkan tadi atau biasanya disebut kerugian Negara. Dalam konteks otonomi daerah, istilah jumlah dan besar kerugian negara sering dipakai penggunaan istilah jumlah dan besar kerugian daerah. Artinya penyelewengan di sini lebih ditekankan penyelewengan terhadap penggunaan APBD.

Jumlah dan besar kerugian daerah ini diperoleh dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur selaku Badan Pengawas Penggunaan Anggaran di Instansi-instansi Jawa Timur. Laporan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tentang penyelewengan anggaran itu, bersumber dari LHP (Laporan Hasil

Pemeriksaan) yang terbagi menjadi 2 kategori yaitu temuan 01 (kerugian daerah) dan temuan 02 (temuan kewajiban setor). Kerugian daerah yang dimaksud dalam temuan 01 antara lain kelebihan pembayaran tunjangan, pekerjaan, honor/upah, biaya transport, biaya BBM, biaya perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan dan kemahalan harga. Sedangkan temuan 02 antara lain meliputi denda keterlambatan pekerjaan, tunggakan retribusi, kekurangan setor PAD, pajak belum dipungut dan disetor, tunggakan pajak dan kredit.

Inspektorat Jawa Timur melaporkan bahwa jumlah temuan pada tahun 2011 sebanyak 10 temuan untuk jenis temuan 01 jauh lebih berkurang dibanding tahun 2010 sebanyak 34 temuan. Sedangkan temuan jenis 02 pada tahun 2011 adalah 8 temuan dan juga lebih sedikit dibanding tahun 2010 sebanyak 11 temuan pada kategori yang sama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa penggunaan anggaran negara sudah semakin efektif, dan pejabat pemerintah sudah sangat memahami pentingnya penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya dari segi jumlah temuan, termasuk juga dari segi nilai, kerugian negara tahun 2011 jauh lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya angka mencapai ratusan juta rupiah, pada tahun 2011 tercatat hanya 29,74 juta rupiah pada temuan 01 dan 56,67 juta rupiah pada temuan 02. Dari kedua jenis kerugian tersebut, telah dikembalikan ke negara masing-masing 21,14 juta rupiah untuk temuan 01 dan 48,64 juta rupiah untuk temuan 02. Dengan demikian masih terhutang atau yang harus dikembalikan ke negara sebesar 8,60 juta rupiah (temuan 01) dan 8,04 juta rupiah (temuan 02).

Keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menekan angka kerugian negara ini juga didorong oleh program SQ (Spiritual Quotient) kepada pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif bahwa mereka harus sadar pertanggung jawaban memegang amanah tidak hanya

berakhir hanya saat menjabat saja, tetapi akan dipertanggung jawabkan di hari pembalasan (hari kiamat) nanti. Mereka harus sadar bahwa apa-apa yang telah diterimanya lewat honor atau gaji, tak lain adalah bagian yang telah diperoleh dari keringat rakyat dalam bentuk pajak, sehingga harus bekerja dengan amanah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan tidak berlaku keji seperti korupsi.

Jika pejabat semakin sadar posisinya sebagai abdi negara dan kinerja pengawasan oleh Inspektorat ditingkatkan, maka kerugian negara akan semakin mengecil bahkan nol dikemudian hari. Ini merupakan keberhasilan Pemerintahan Jawa Timur yang patut dibanggakan.

Tabel 4.199
Rekapitulasi Nilai Temuan
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Timur 2011

No	Jenis Temuan	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)	Ditarik (Rp)	Sisa (Rp)
Temuan 01					
1	Kelebihan pembayaran tunjangan	7	26.382.750,00	17.783.978,00	8.598.772,00
2	Kekurangan volume pekerjaan	2	2.757.729,44	2.757.729,44	0
3	Pembayar honor tidak efisien	1	600.000,00	600.000,00	0
4	Perjalanan honor tumpang tindih				
5	Pembayaran uang sidang tidak efisien				
6	Biaya transport tidak efisien				
7	pembayaran pekerjaan tidak efisien				
Jumlah		10	29.740.479,44	21.141.707,44	8.598.772,00
Temuan 02					
1	Tunggakan retribusi	5	53.944.700,00	45.907.700,00	8.037.000,00
2	Pajak belum dipungut	2	2.704.724,00	2.704.724,00	0
3	Pajak belum disetor				
4	Denda keterlambatan pekerjaan	1	23.364,00	23.364,00	0
Temuan Administratif					
Jumlah		8	56.672.788,00	48.635.788,00	8.037.000,00

